



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

LAPORAN KINERJA

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2024 ini dapat selesai disusun.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun sebagai bagian dari Pertanggungjawaban akuntabilitas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan kepada masyarakat. LKjIP ini bertujuan untuk menginformasikan capaian keberhasilan kinerja atas sasaran strategis melalui penyusunan capaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya, laporan ini juga merupakan bahan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar lebih efektif dan efisien serta berorientasi pada hasil, guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*)

Demikianlah Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2024 ini disusun, semoga bermanfaat. Masukan dan saran guna peningkatan kinerja maupun peningkatan kualitas dalam penyusunannya sangat diharapkan.

Ketapang, Februari 2025
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Ketapang



Ir. Adi Mulia, M.Hut
Nip. 196510091992031012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1. Struktur Organisasi	8
1.2. Tugas dan Fungsi	9
1.3. Isu-Isu Strategis	13
1.4. Keadaan Pegawai.....	15
1.5. Kedaan Sarana dan Prasarana.....	17
1.6. Keuangan	18
1.7. Sistematika LKjIP	
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
2.1. Perencanaan Strategis	20
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	23
2.3. Rencana Anggaran Tahun 2024	24
2.4. Instrumen Pendukung.....	36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024	27
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	30
3.3. Realisasi Anggaran.....	99
3.4. Tindak Lanjut Rekomendasi APIP	102
BAB IV PENUTUP	105
LAMPIRAN:	
1. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah tahun 2024	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Distribusi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2024	15
Tabel 1.2 Distribusi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024	16
Tabel 1.3 Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2024	16
Tabel 1.4 Keadaan Sarana dan Prasarana pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2024	18
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2022-2026	21
Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang	22
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2024	23
Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menurut Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2024 (Sebelum Perubahan APBD)	25
Tabel 2.7 Alokasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Menurut Sasaran Strategis (setelah APBD Perubahan) Tahun Anggaran 2024	25
Tabel. 3.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026	27
Tabel. 3.2 Capaian Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2024	29
Tabel. 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Setiap Sasaran	31

Tabel. 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	31
Tabel. 3.5 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2024	41
Tabel. 3.6 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama “Indeks Ketersediaan, Indeks Keterjangkauan dan Indeks Pemanfaatan”	42
Tabel. 3.7 Indikator Sasaran Strategis Bidang Ketahanan Pangan	42
Tabel. 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Bidang Ketahanan Pangan dengan Kabupaten tetangga Tahun 2024.....	44
Tabel. 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Setiap Sasaran	45
Tabel. 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	45
Tabel. 3.5 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2024.....	47
Tabel. 3.6 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama “Jumlah Produksi Perikanan Tangkap”	47
Tabel. 3.7 Indikator Sasaran Strategis Bidang Ketahanan Pangan	48
Tabel. 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Bidang Perikanan Tangkap dengan Kabupaten tetangga Tahun 2024	50
Tabel. 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	51
Tabel. 3.5 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2024.....	53

Tabel. 3.6 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama “Jumlah Produksi Perikanan Budidaya”	53
Tabel. 3.7 Indikator Sasaran Strategis Bidang Ketahanan Pangan	54
Tabel. 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Bidang Perikanan Budidaya dengan Kabupaten tetangga Tahun 2024	56
Tabel. 3.9 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Setiap Sasaran	56
Tabel. 3.10 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	57
Tabel 3.11 Realisasi Kinerja Capaian Produksi Perikanan Tangkap Per-Kecamatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang	67
Tabel. 3.13 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama “Persentase Jumlah Produksi Perikanan Tangkap” Terhadap Target Renstra.....	68
Tabel. 3.14 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama “Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap” Tahun 2021-2024.....	68
Tabel. 3.15 Indikator Sasaran Strategis Bidang Perikanan Tangkap 2022-2026	69
Tabel. 3.16 Tabel 3.16.Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2. Pengawasan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	71
Tabel 3.17 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama “Persentase penurunan hasil tangkapan sampingan (bycatch)” Terhadap Target Renstra.....	71
Tabel 3.18 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatkan Pengawasan Perikanan” Tahun 2021-2024.....	73
Tabel 3.19 Indikator Sasaran Strategis ke-2 Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2022-2026.....	74
Tabel 3.20 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Bidang Perikanan Tangkap dengan Kabupaten tetangga Tahun 2024.....	75
Tabel 3.21 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama “Jumlah Produksi Perikanan Budidaya”	84
Tabel 3.22 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama “Jumlah Produksi Perikanan Budidaya” Tahun 2021-2024.....	85
Tabel 3.23 Indikator Sasaran Strategis Bidang Perikanan Budidaya.....	85

Tabel 3.25 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Bidang Perikanan Budidaya dengan Kabupaten tetangga Tahun 2024.....	87
Tabel 3.26 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Setiap Sasaran.....	88
Tabel 3.27 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.....	88
Tabel 3.28 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis Bidang Perikanan Budidaya Tahun 2024.....	91
Tabel 3.29 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama “Pengawasan Perikanan Budidaya”.....	91
Tabel 3.30 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama “Pengawasan Perikanan Budidaya”.....	92
Tabel 3.31 Indikator Sasaran Strategis Bidang Perikanan Budidaya.....	93
Tabel 3.32 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Bidang Perikanan Budidaya dengan Kabupaten tetangga Tahun 2024.....	94
Tabel 3.33 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Setiap Sasaran.....	94
Tabel 3.34 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.....	95
Tabel 3.35 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis Meningkatkan Produksi Olahan Perikanan Tahun 2024”.....	96
Tabel 3.36 Capaian Kinerja “Persentase Produk Perikanan yang Bersertifikat” Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra”.....	96
Tabel 3.37 Indikator Sasaran Strategis Bidang Perikanan Budidaya”.....	97
Tabel 3.38 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Produksi Olahan Perikanan dengan Kabupaten tetangga Tahun 2024”.....	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	13
Gambar 1.2 Kondisi Gedung Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2024	17
Gambar 2.1 Aplikasi Sistem Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2024	26
Gambar 3.1 Grafik Capaian Indikator Kinerja Utama “Indeks Ketersediaan” Tahun 2020-2024	44
Gambar 3.2 Grafik Capaian Indikator Kinerja Utama “Indeks Keterjangkauan” Tahun 2020-2024	49
Gambar 3.3 Grafik Capaian Indikator Kerja Utama “Indeks Pemanfaatan” Tahun 2020-2024	55
Gambar 3.4 Grafik “Jumlah Produksi Perikanan Tangkap”	69

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang, sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati atas kinerja yang telah diperjanjikan dan dicapai dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ketapang serta sebagai bahan masukan untuk memperbaiki kinerja untuk periode waktu berikutnya.

Dalam laporan kinerja ini disajikan data program dan kegiatan maupun alokasi anggaran per sub kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sebagaimana tertuang pada APBD Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2024 termasuk perubahan APBD yang telah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang. Namun sebelum menyajikan dan melakukan analisis tentang capaian kinerja pada bab berikutnya terlebih dahulu digambarkan kondisi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang hingga Desember 2024.

1.1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta

Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang, maka Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris Dinas membawahi 1 (satu) Sub Bagian yaitu :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Ketahanan Pangan;
4. Bidang Perikanan Tangkap;
5. Bidang Perikanan Budidaya; dan
6. UPTD Perikanan Budidaya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional yaitu untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Ketapang Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang.

1.2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 91 Tahun 2022, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang mempunyai tugas untuk membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketahanan pangan dan bidang perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Pelayanan Publik di lingkungan Dinas;
- e. Pelaksanaan administrasi di lingkungan dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut di atas dilakukan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melalui perangkat organisasinya yang terdiri dari unsur Sekretariat Dinas dan bidang-bidang teknis yaitu:

1.2.1.1. Sekretariat Dinas

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, pengelolaan keuangan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan dinas yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas sub bagian dan pejabat fungsional selaku koordinator.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas maka sekretariat dinas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan perencanaan dinas;
- 2) Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan dinas;
- 3) Penyelenggaraan urusan kepegawaian dinas;
- 4) Penyelenggaraan urusan keuangan dinas;
- 5) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perencanaan, umum dan perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan dinas;
- 6) Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada unit fungsional penyusunan program dan pelaporan, unit fungsional keuangan dan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Sekretaris Dinas memimpin, mengoordinasikan, memberikan arahan dan petunjuk kepada pejabat fungsional penyusunan program, pengelolaan keuangan, dan kepala sub bagian umum, kepegawaian, perlengkapan, dan evaluasi serta pelaporan dinas.

1.2.1.2. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Ketahanan Pangan serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Ketahanan Pangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan;
- 2) Penyusunan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan;
- 3) Penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan pangan;
- 4) Penyelenggaraan kegiatan di bidang ketahanan pangan;
- 5) Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada Bidang Ketahanan Pangan.
- 6) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan pangan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.2.1.3. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang perikanan tangkap mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Perikanan Tangkap serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Perikanan Tangkap.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang perikanan tangkap menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang perikanan tangkap;
- 2) Perumusan program dan kegiatan bidang perikanan tangkap;
- 3) Penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan perikanan tangkap;
- 4) Penyelenggaraan kegiatan di bidang perikanan tangkap;
- 5) Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada Bidang Perikanan Tangkap;
- 6) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perikanan tangkap; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.2.1.4. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang perikanan budidaya mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Perikanan Budidaya serta bertanggung

jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Perikanan Budidaya.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang perikanan budidaya menyelenggarakan fungsi yaitu :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan budidaya;
- 2) Penyusunan program dan kegiatan di bidang perikanan budidaya;
- 3) Penyusunan pedoman pelaksanaan di bidang perikanan budidaya;
- 4) Penyelenggaraan kegiatan di bidang perikanan budidaya;
- 5) Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada Bidang Perikanan budidaya;
- 6) Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perikanan budidaya; dan
- 7) Pelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.2.1.5. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perikanan Budidaya

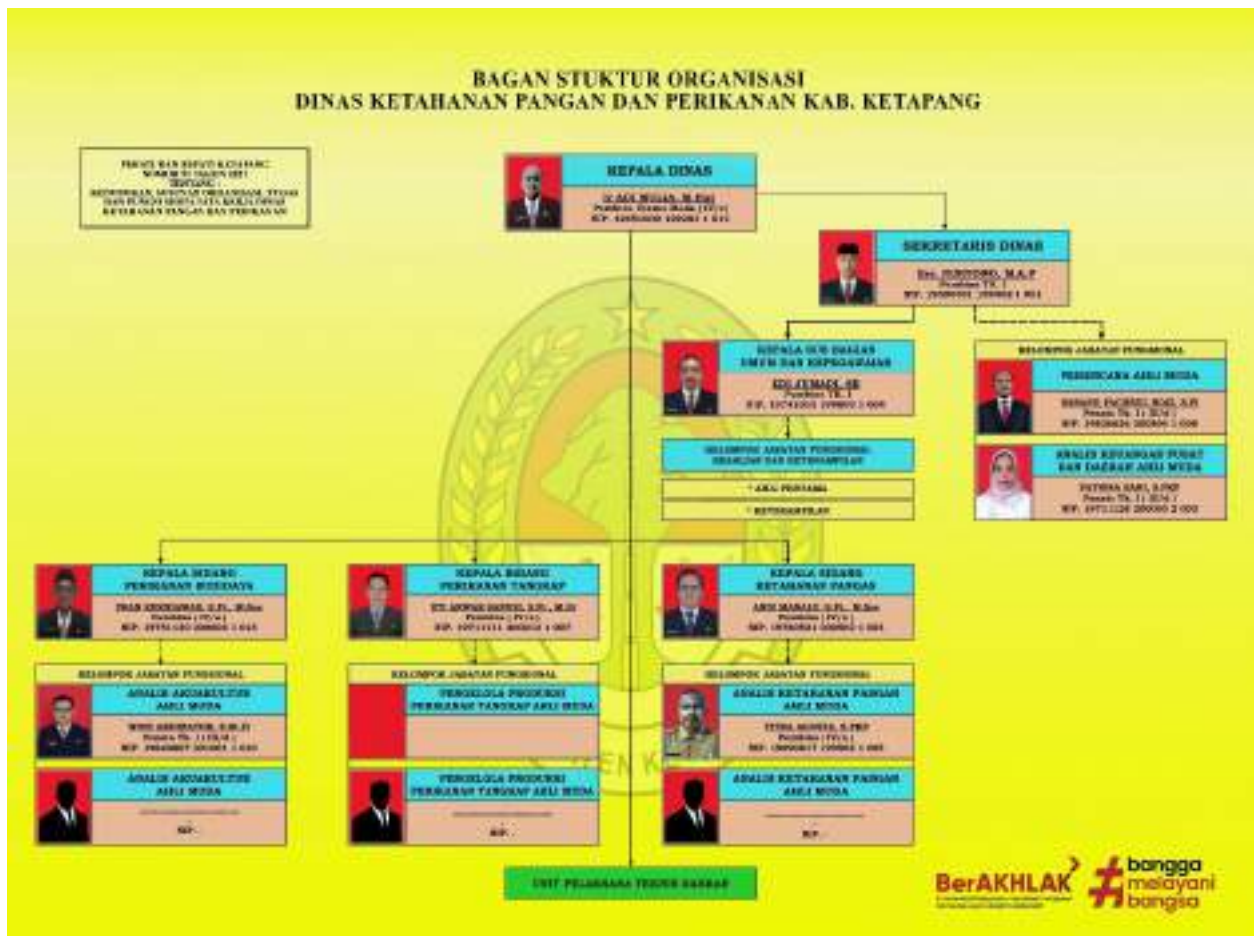
UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, dan membawahi unit Balai Benih Ikan (BBI), Balai Benih Ikan Pantai (BBIP), Unit Pelaksana Perikanan (UPP). UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas. Dalam pelaksanaan tugas teknis, UPTD Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Pengelolaan UPTD Perikanan Budidaya;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan UPTD Perikanan Budidaya; dan
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD.

1.2.1.6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pada gambar berikut ini ditampilkan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang.

Gambar1.1
Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan



1.3. Isu-Isu Strategis

Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sangat dipengaruhi oleh faktor internal organisasi dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, kondisi sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pencapaian kinerja.

Permasalahan yang masih dihadapi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Berkurangnya lahan produksi pangan akibat maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi tanaman perkebunan sawit dan kegiatan pertambangan di Kabupaten Ketapang.
2. Masih sulitnya kondisi infrastruktur antar wilayah kecamatan untuk mendukung jalur distribusi pangan di Kabupaten Ketapang sehingga kondisi tersebut berdampak pada kondisi ketahanan pangan dan harga pangan.
3. Belum optimalnya upaya program diversifikasi pangan non nasi, termasuk pengawasan pangan segar asal tumbuhan agar terjamin kualitasnya.
4. Adanya penurunan potensi sumberdaya Ikan akibat gangguan ekosistem air (terumbu karang dan mangrove), kelebihan tangkapan (*overfishing*), penggunaan alat tangkap terlarang (*mini trawl*), penggunaan bahan peledak dan meningkatnya kegiatan industri perkebunan dan pertambangan.
5. Penurunan produksi perikanan di wilayah perairan umum karena beberapa sebab indikatif, seperti kurangnya pengetahuan/kapasitas SDM nelayan, kurangnya peralatan perikanan tangkap yang memadai, belum optimalnya pengawasan di kawasan perikanan tangkap (masyarakat masih ada yang menggunakan racun ikan, setrum), dan belum optimalnya sarana prasarana perikanan tangkap.
6. Belum optimalnya pengolahan sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai modal dasar dalam percepatan pertumbuhan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang disebabkan oleh terbatasnya jaringan prasarana, terbatasnya akses permodalan, kurangnya penyuluhan, tingginya fluktuasi harga pasar, dan terbatasnya prasarana industri pengolahan hasil ikan.
7. Keamanan pangan produk hasil pengolahan ikan yang kurang memenuhi persyaratan mutu yaitu bebas dari bahan tambahan yang dilarang seperti formalin.
8. Sulitnya nelayan perikanan tangkap/perairan umum untuk mendapatkan BBM Solar Bersubsidi yang disediakan Pemerintah sehingga berpengaruh kepada frekuensi aktivitas penangkapan ikan di laut dan hal ini sangat berpengaruh terhadap hasil produksi perikanan tangkap sepanjang tahun.

Dari berbagai permasalahan pada sektor ketahanan pangan dan perikanan yang dihadapi, tantangan dan potensi mendasari perumusan isu-isu strategis bidang ketahanan pangan dan perikanan.

Adapun isu-isu strategis yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kontribusi dari potensi sumber daya alam yang cukup besar di sektor pangan padahal dengan luasnya lahan pertanian seharusnya dapat meningkatkan produksi dan cadangan pangan daerah yang kemudian dapat meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Ketapang.
2. Belum optimalnya kontribusi sumberdaya dari sektor perikanan cukup besar dengan potensi sumber daya lahan dan luas perairan yang menjadi kewenangan daerah terhadap perekonomian daerah di Kabupaten Ketapang.
3. Tingginya potensi alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan dan pertambangan sehingga berpengaruh pada produksi pangan dan kurangnya lahan untuk perikanan budidaya.
4. Perlunya pengembangan sentra produksi pangan yang terpadu dari berbagai sektor (pengembangan agropolitan) untuk mendukung ketahanan pangan daerah.

1.4. Keadaan Pegawai

Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan tenaga kontrak (Non PNS) hingga akhir Desember tahun 2024 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah sebanyak **92 orang** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1

Distribusi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2024

No.	Jabatan	Jumlah	%
1	Eselon II.b	1	1,09
2	Eselon III.a	1	1,09
3	Eselon III.b	3	3,26
4	Eselon IV.a	1	1,09
5	Eselon IV.b	1	1,09
6	Fungsional Tertentu	8	8,70
7	Non Eselon / Staf PNS	18	19,57
9	PPPK	6	6,52
10	Sub Total ASN	39	42,39
11	Staf Non ASN	53	57,61
Total		92	100

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2024

Berdasarkan tabel tersebut di atas, pegawai negeri sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja di Dinas Ketahanan

Pangan dan Perikanan hanya **42,39 %**, selebihnya yaitu sebesar **57,61 %** berstatus sebagai tenaga Non PNS atau tenaga kontrak.

Tabel 1.2
Distribusi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
A	ASN / PPPK		
1	SLTA	10	25,64
2	D-III	1	2,56
3	S-1 / D4	22	56,41
4	S-2	6	15,38
Sub Total		39	100
A	NON ASN		
1	SD	8	15,09
2	SLTP	4	7,55
3	SLTA	15	28,30
4	D-III	8	15,09
5	S-1 / D4	18	33,96
6	S-2	0	0,00
Sub Total		53	100
Total		92	

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2024

Tingkat Pendidikan PNS pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berdasarkan tabel tersebut di atas sebesar 25,64% masih tingkat SLTA ke bawah, kemudian 2,56% Pendidikan Diploma (DIII), 56,41% Pendidikan strata-1 (S-1) dan 15,38% strata-2. Pendidikan tenaga Non PNS dari 53 orang proporsi Pendidikan dengan tingkat Pendidikan SD 15,09%, SLTP 7,55%, SLTA 28,30%, DIII 15,09%, dan S-1/DIV 33,96%.

Pada tabel di bawah ini juga ditampilkan distribusi pegawai berdasarkan golongan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.3
Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan
pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2023

No.	Golongan	Jumlah	%
1	Golongan IV	8	20,51
2	Golongan III	25	64,10
3	Golongan II	6	15,39
Total		39	100,00

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2024

Kondisi ketenagaan hingga akhir Desember 2024 belum memadai, terutama untuk tenaga-tenaga teknis fungsional di bidang ketahanan pangan, teknologi hasil pertanian, tenaga teknis perikanan, tenaga teknis di bidang keuangan, teknologi informasi (IT) dan tenaga administrasi keuangan/akuntansi masih sangat dibutuhkan agar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dapat berjalan lebih optimal.

1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang hingga akhir tahun 2024 masih belum memadai. Kondisi ruangan gedung Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai layanan publik masih layak namun perlu dilakukan **rehabilitasi ruangan seperti ruang untuk konsultasi, ruang untuk ibu menyusui, ruangan untuk rapat yang memadai, dan rehabilitasi kamar mandi/wc untuk umum, kemudian perbaikan jalan lingkungan dan halaman kantor, penataan taman kantor dan pembangunan prasarana parkir kendaraan serta rehab atap dan pengecatan gedung rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.**

Pemenuhan kebutuhan prasarana peralatan kerja seperti Televisi, Notebook/PC, Printer, Kamera, Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 untuk mendukung kegiatan operasional di lapangan masih sangat diperlukan. Berikut ini adalah kondisi gedung Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang hingga Desember 2024.

Gambar 1.2
Kondisi Gedung Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Ketapang Tahun 2024



Gambaran lebih rinci terkait ketersediaan sarana prasarana pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan hingga akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4
Keadaan Sarana dan Prasarana pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2024

No	Nama Sarana/Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Gedung Kantor Dinas	1 Unit	Rusak Ringan
2	Gedung UPTD Perikanan Budidaya	1 Unit	Rusak Ringan
3	Balai Benih Ikan (BBI)	2 Unit	Rusak Sedang
4	Panti Benih	1 Unit	Rusak Ringan
5	BBIP Kendawangan	1 Unit	Rusak Ringan
6	Pos UPP	12 Unit	Rusak Ringan
7	Pos Penyuluh	3 Unit	Rusak Ringan
8	Pos Kesehatan Ikan	1 Unit	Rusak Ringan
9	Kolam Ikan Percontohan	1 Buah	Rusak Ringan
10	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	4 Unit	2 Rusak Berat, 1 Rusak Ringan, 1 baik
11	Kendaraan Dinas Roda 2	32 Unit	Baik

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2024

1.6 Keuangan

Anggaran untuk belanja program dan kegiatan/sub kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 bersumber dari APBD Kabupaten Ketapang dan DAK sesuai dengan Peraturan Bupati Ketapang tentang Penjabaran APBD yang dirinci dalam dokumen pelaksanaan anggaran dan perubahan anggaran (DPA/DPPA).

Alokasi anggaran yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan pada tahun anggaran 2024 sebelum perubahan adalah sebesar **Rp.17.595.353.167,-** dan setelah perubahan APBD bertambah menjadi **Rp.19.551.925.428,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp.17.423.233.023,-** atau **89,11%**. Total anggaran tersebut sudah termasuk untuk belanja pegawai termasuk untuk belanja pembayaran honorarium pegawai Non PNS pada masing-masing bidang/unit kerja.

Alokasi anggaran yang tersedia masih belum memadai atau mencukupi untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan prioritas di bidang ketahanan pangan, perikanan tangkap dan perairan umum serta perikanan budidaya termasuk untuk kegiatan pembinaan dan peningkatan mutu pengolahan hasil perikanan.

1.7. Sistematika LKjIP

Penulisan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ini disusun dengan sistematika berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Surat Sekretaris Daerah Nomor 060/0243/OR-C tertanggal 31 Januari 2021 yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang, tugas dan fungsi, isu-isu strategis yang dihadapi, keadaan pegawai, keadaan sarana dan prasarana, informasi anggaran/keuangan dan sistematika penulisan LKjIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini menguraikan tentang Perencanaan Strategis, Visi, Misi Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, kemudian Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Rencana Anggaran Tahun 2024 serta instrument pendukung lainnya.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan tentang Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2024, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Strategis dan Realisasi Anggaran dalam rangka mencapai masing-masing sasaran strategis.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2024 serta langkah - langkah di masa mendatang yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

2.1.1. Visi Misi Kepala Daerah

Perencanaan kinerja dan penganggaran berbagai program dan kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran strategis tahun anggaran 2024 merupakan Tahun ke-3 (ketiga) dari periode Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah yaitu ***"Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera"***. Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan dan perikanan adalah dalam rangka mewujudkan Misi Kepala Daerah yang ke-1 (satu) yaitu ***"Mewujudkan Pemerintahan yang Handal, Bersih, Terpercaya dan Berwibawa dalam Pelayanan Publik"*** dan Misi ke-5 (kelima) yaitu ***"Memperkokoh Landasan Perekonomian Masyarakat"***.

Merujuk pada misi tersebut di atas, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kedaulatan pangan dengan terjaminnya ketahanan pangan melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal. Kemudian meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor perikanan tangkap dan perairan umum, perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah Tahun 2021-2026 melalui misi ke-1 (satu) yaitu ***"Mewujudkan Pemerintahan yang Handal, Bersih, Terpercaya dan Berwibawa dalam Pelayanan Publik"*** dan misi ke-5 (lima) yaitu ***"Memperkokoh Landasan Perekonomian Masyarakat"***, maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam jangka menengah beserta indikator kinerjanya akan diwujudkan melalui

pelaksanaan berbagai program dan kegiatan prioritas sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2022, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2022-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran pada Tahun					
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Meningkatnya Ketaulatan Pangan	-	Indeks Ketahanan Pangan	76,8	78,56	80,32	82,08	83,84	
			Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketersediaan	86,73	87,64	87,96	88,64	88,97
				Indeks Keterjangkauan	82,32	83,43	83,86	84,74	84,87
				Indeks Pemanfaatan	61,43	62,44	62,56	63,44	63,88
2	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perikanan	-	Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan	0,41	0,83	2,07	3,62	4,53	
			Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	24.428,06	26.648,78	28.869,52	31.089,24	33.310,98
			Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	20.787,33	22.866,73	25.153,40	27.668,74	30.435,61
			Meningkatnya Kualitas Produksi Perikanan	Persentase Produk Perikanan yang Bersertifikat	11%	11%	12%	12%	12%
3	Meningkatnya Reformasi Birokrasi yang Akuntabel dan Menopang Pelayanan Publik	-	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	56 (CC)	60,01 (B)	62 (B)	66 (B)	70 (BB)	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	12 (C)	17 (C)	20 (CC)	21,8 (B)	23 (B)

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2024

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran maka ditetapkan upaya-upaya melalui penetapan strategi dan arah kebijakan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang

Visi	: Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera		
Misi 1	: Mewujudkan Pemerintahan yang Handal, Bersih, Terpercaya dan Berwibawa dalam Pelayanan Publik		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Reformasi Birokrasi yang akuntabel dan menopang pelayanan publik	Meningkatnya Tata Kelila Pemerintahan yang Baik pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Peningkatan Kelembagaan Berbasis Kinerja	Peningkatan Ketersediaan dan kualitas data kinerja
			Pelaksanaan, Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan
			Pelaksanaan Kepemerintahan dengan Akuntabel, Handal dan Terpercaya
			Peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah
			Peningkatan kompetensi manajerial, teknis, dan fungsional
			Peningkatan sistem pelayanan public daerah
			Peningkatan sistem pengadaan barang dan jasa
Misi	: Memperkokoh Landasan Perekonomian Masyarakat		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kedaulatan Pangan	Meningkatkan Ketersediaan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan	Peningkatan stok Cadangan pangan Peningkatan Lumbung pangan dan sarana pendukung
	Meningkatkan Keterjangkauan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur pendukung distribusi pangan Pengembangan toko tani
	Meningkatkan Pemanfaatan pangan	Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Peningkatan Diversifikasi Pangan non-nasi
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perikanan	Meningkatkan Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan produksi perikanan tangkap	Peningkatan pengetahuan/kapasitas SDM nelayan
			Peningkatan peralatan perikanan tangkap Peningkatan sarana prasarana perikanan tangkap
		Persentase Peningkatan produksi perikanan budi	Peningkatan Pengetahuan/kapasitas SDM pelaku pembudidaya
			Peningkatan Jangkauan distribusi benih ikan budidaya

			Peningkatan sarana prasarana perikanan budidaya
	Meningkatkan Pengawasan Perikanan	Persentase penurunan hasil tangkapan sampingan (bycatch)	Penurunan penggunaan racun ikan dan setrum di Kawasan perikanan tangkap
		Persentase peningkatan produksi olahan perikanan	Penurunan penggunaan keramba yang berlebihan di Kawasan sungai
	Meningkatkan Produksi Olahan Perikanan	Persentase peningkatan produksi olahan perikanan	Peningkatan penjaminan mutu dalam pengolahan ikan segar
			Optimalisasi perikanan berbasis teknologi

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2024

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja merupakan lembar dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Daerah sebagai pemberi amanah kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja ini, akan terwujud komitmen dan kesepakatan antara Bupati sebagai pemberi amanah dengan Kepala Perangkat Daerah sebagai penerima amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun untuk perjanjian kinerja tahun 2024 terjadi perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang semula mengikuti perbup Nomor 60 Tahun 2023 berubah menjadi Perbup Nomor 34 Tahun 2024. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Ketapang Semester I
Tahun Anggaran 2024

Perjangkin Kepala Dinas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	20 Angka
2	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketersediaan	87,96
		Indeks Keterjangkauan	83,85
		Indeks Pemanfaatan	63,56
3	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	28.869,52
4	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	25.153,40
5	Meningkatnya Kualitas Produksi Perikanan	Persentase Produk Perikanan yang bersertifikat	12%
No.	Program	Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.412.919.167,-	APBD
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp 290.340.000,-	APBD
3	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 510.000.000,-	APBD
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 175.600.000,-	APBD
5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 90.000.000,-	APBD
6	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 4.796.494.000,-	APBD
7	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 3.650.000.000,-	APBD
8	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp 80.000.000,-	APBD
9	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 1.590.000.000,-	APBD
Total		Rp 17.595.353.167,-	

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2024

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Ketapang Semester II
Tahun Anggaran 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	20 Angka
2	Meningkatkan Ketersediaan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan	153,22 Persen
3	Meningkatkan Keterjangkauan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	14 Persen
4	Meningkatkan Pemanfaatan Pangan	Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	85 Persen
5	Meningkatkan Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	3,79 Persen
		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	19,82 Persen
6	Meningkatkan Pengawasan Perikanan	Persentase Penurunan Hasil Tangkapan Sampingan (bycatch)	40,10 Persen
		Persentase Peningkatan Kepatuhan administrasi bagi pelaku usaha perikanan	26,79 Persen
7	Meningkatkan Produksi Olahan Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan	31,51 Persen
No.	Program	Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.723.503.763,-	APBD
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp 590.340.000,-	APBD
3	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 670.000.000,-	APBD
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 175.600.000,-	APBD
5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 160.000.000,-	APBD
6	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 5.313.336.935,-	APBD
7	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 4.218.703.030,-	APBD
8	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp 90.441.700,-	APBD
9	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 1.610.000.000,-	APBD
Total		Rp 19.551.925.428,-	

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2024

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai sasaran. Penetapan indikator kinerja pada saat perencanaan kinerja akan mampu meningkatkan kualitas perencanaan. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2024

2.3.1. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja program dan kegiatan/sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang dialokasikan pada 6 (ENAM) sasaran strategis. Rincian alokasi anggaran per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5.
Alokasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
menurut Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2024 (Sebelum Perubahan APBD)

No	Sasaran Strategis	Alokasi Anggaran
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Rp. 1.065.940.000,-
2	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Rp. 4.796.494.000,-
3	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Rp. 3.650.000.000,-
4	Meningkatkan Pengawasan Perikanan	Rp. 80.000.000,-
5	Meningkatnya Kualitas Produksi Perikanan	Rp. 1.590.000.000,-
6	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Rp. 6.412.919.167,-
Jumlah		Rp.17.595.353.167,-

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2024

Setelah APBD Perubahan, alokasi anggaran untuk belanja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang mengalami peningkatan baik untuk belanja program prioritas dan program penunjang untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Jumlah anggaran untuk belanja program prioritas dan untuk program penunjang adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini.

Rincian alokasi anggaran menurut sasaran strategis setelah APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6.
Alokasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Menurut Sasaran Strategis (setelah APBD Perubahan) Tahun Anggaran 2024

No	Sasaran Strategis	Alokasi Anggaran
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Rp. 1.595.940.000,-
2	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Rp. 5.313.336.935,-
3	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Rp 4.218.703.030,-
4	Meningkatnya Kualitas Produksi Perikanan	Rp. 1.610.000.000,-
5	Meningkatnya Kualitas Produksi Perikanan	Rp. 90.441.700,-
6	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Rp. 6.723.503.763,-
Jumlah		Rp. 19.551.925.428,-

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2024

Jika dibandingkan alokasi anggaran dalam rangka mencapai sasaran strategis sebelum perubahan dengan setelah perubahan APBD, maka peningkatan anggaran yang signifikan adalah untuk mendukung sasaran strategis *“Meningkatnya ketahanan pangan, Meningkatkan produksi perikanan tangkap dan Meningkatkan produksi perikanan budidaya”*, sementara untuk mendukung sasaran strategis *“Meningkatnya Kualitas Produksi Perikanan”* justru mengalami penurunan setelah APBD Perubahan. Terkait dengan hal ini maka pada tahun anggaran 2024, Program dan Kegiatan untuk mendukung meningkatnya kualitas produksi perikanan harus tetap menjadi prioritas.

2.4 Instrumen Pendukung

Instrumen pendukung dalam melakukan pengukuran kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan selama tahun 2023 sudah mulai menerapkan teknologi informasi dengan nama aplikasi **“K O K I T A ”** yang disediakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang. Adapun tahapan pengukuran kinerja dimulai dengan Penetapan Perjanjian Kinerja, Penyusunan Rencana Aksi Kinerja setelah DPA ditetapkan. Kemudian dilakukan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja serta Evaluasi Rencana Kerja

(Evaluasi Renja) setiap triwulan. Sistem tersebut adalah sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut ini.

Gambar 2.1

Aplikasi Sistem Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Kinerja
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2023



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024 (Renstra 2021-2026)

3.1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja utama daripada sasaran strategis. Perhitungan pencapaian sasaran, memperhatikan karakteristik indikator, yaitu sebagai berikut:

- a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja semakin buruk, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Memperhatikan karakteristik seluruh indikator kinerja sasaran strateg is Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang, maka sifat indikatornya termasuk dalam kategori yang bersifat positif, yaitu **semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian kinerja yang semakin baik**. Dengan adanya perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dari perbup Nomor 60 Tahun 2023 berubah menjadi Perbup Nomor 34 Tahun 2024 dengan demikian target kinerja sasaran strategis jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dapat di lihat pada Tabel 3.1 berikut

Tabel. 3.1

Target Kinerja Sasaran Strategis Jangka Menengah

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan	Ukuran yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana kebutuhan pangan penduduk di suatu wilayah dapat terpenuhi dari ketersediaan pangan yang ada, baik dari produksi lokal, cadangan, maupun pasokan luar.	$= \frac{\text{Ketersediaan Pangan Tahun } x}{\text{Kebutuhan Pangan Tahun } x} \times 100\%$	110	152,16	152,67	153,22	153,67	154,17
2	Meningkatkan Keterjangkauan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Perbandingan antara jumlah wilayah (desa/kecamatan) yang teridentifikasi sebagai rentan pangan dengan total jumlah wilayah yang dinilai dalam suatu kabupaten/kota atau provinsi, yang dinyatakan dalam bentuk persentase.	$= \frac{\text{Jumlah daerah rentan rawan pangan}}{\text{Total Seluruh Daerah}} \times 100\%$	16	15,5	15	14,5	14	13,5
3	Meningkatkan Pemanfaatan Pangan	Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Persentase jumlah sampel pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan (bebas dari cemaran kimia, biologi, dan fisik sesuai ambang batas) dibandingkan dengan total sampel yang diuji dalam periode tertentu.	$= \frac{\text{Jumlah pangan segar aman}}{\text{Total Sampel yang diambil}} \times 100\%$	80	80	85	85	90	90

4	Meningkatkan Produksi Perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Perbandingan antara selisih produksi perikanan tangkap pada tahun berjalan dengan produksi tahun sebelumnya, dibagi dengan produksi tahun sebelumnya, yang dinyatakan dalam bentuk persentase.	$= \frac{(\text{jumlah produksi perikanan tangkap}(t) \text{ ton} - \text{jumlah produksi perikanan tangkap}(t - 1) \text{ ton})}{\text{jumlah produksi perikanan tangkap}(t - 1)}$	2%	6,13%	3,44%	3,79%	4,17%	7,38%
		Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Ukuran dalam bentuk persentase yang menunjukkan kenaikan jumlah hasil produksi perikanan budidaya (ikan, udang, rumput laut, dan komoditas lainnya) dalam suatu wilayah dan periode waktu tertentu, dibandingkan dengan produksi pada periode sebelumnya.	$= \frac{(\text{jumlah produksi perikanan budidaya}(t) \text{ ton} - \text{jumlah produksi perikanan budidaya}(t - 1) \text{ ton})}{\text{jumlah produksi perikanan budidaya}(t - 1)}$	16,74%	16,38%	18,02%	19,82%	21,80%	23,98%
5	Meningkatkan Pengawasan Perikanan	Persentase penurunan hasil tangkapan sampingan (bycatch)	Ukuran dalam bentuk persentase yang menunjukkan penurunan volume hasil tangkapan sampingan (ikan atau biota non-target) dari kegiatan penangkapan ikan dalam suatu wilayah dan periode waktu tertentu, dibandingkan dengan volume bycatch pada periode sebelumnya.	$= \frac{(\text{jumlah hasil tangkapan sampingan}(bycatch) \text{ tahun } n - \text{jumlah hasil tangkapan sampingan}(bycatch) \text{ tahun } n - 1)}{\text{jumlah hasil tangkapan sampingan}(bycatch) \text{ tahun } n - 1} \times 100\%$	50,00%	45,50%	42,00%	40,10%	38,68%	36,90%
		Persentase peningkatan kepatuhan administrasi bagi pelaku usaha perikanan	Persentase peningkatan kepatuhan administrasi bagi pelaku usaha perikanan adalah ukuran dalam bentuk persentase yang menggambarkan peningkatan jumlah pelaku usaha perikanan yang memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam periode	$= \frac{\text{jumlah persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan}(n) - \text{jumlah persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan}(n - 1)}{\text{jumlah persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan}(n - 1)} \times 100\%$	NA	NA	NA	26,79%	35,71%	37,50%

			waktu tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya.							
6	Meningkatkan Produksi Olahan Perikanan	Persentase peningkatan produksi olahan perikanan	Persentase peningkatan produksi olahan perikanan adalah ukuran dalam bentuk persentase yang menunjukkan pertumbuhan volume hasil pengolahan produk perikanan dalam suatu periode waktu tertentu dibandingkan periode sebelumnya.	$= \frac{(\text{jumlah produksi olahan perikanan (t) ton} - \text{jumlah produksi olahan perikanan (t - 1) ton})}{\text{Jumlah produksi olahan perikanan (t - 1)}} \times 100$	NA	NA	35,39%	31,51%	33,09%	35,40%

Sumber: Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2024

Pada Tabel Target Kinerja Sasaran Strategis jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2021-2026 bahwa Rumus Formulasi Perhitungan yang digunakan pada sasaran strategis meningkatnya ketahanan pangan sudah disesuaikan dengan hasil perhitungan Badan Pangan Nasional, untuk sasaran strategis meningkatnya produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya masing - masing menggunakan formulasi perhitungan jumlah produksi perikanan tangkap dalam 1 tahun dan jumlah produksi perikanan budidaya dalam 1 tahun, untuk sasaran strategis meningkatnya kualitas produksi perikanan sudah disesuaikan dengan jumlah produk olahan perikanan yang bersertifikat dibagi total olahan perikanan dikali 100%.

Tabel. 3.2

Capaian Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Ketersediaan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan	Persen	153,22	141	92,02
2	Meningkatkan Keterjangkauan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen	14,5	6,11	137,32
3	Meningkatkan Pemanfaatan Pangan	Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Persen	85	99,06	116,54
4	Meningkatkan Produksi Perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Persen	3,79	3,98	105,04
		Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Persen	19,82	15,453	77,96
5	Meningkatkan Pengawasan Perikanan	Persentase penurunan hasil tangkapan sampingan (bycatch)	Persen	40,10	38,50	96,01
		Persentase peningkatan kepatuhan administrasi bagi pelaku usaha perikanan	Persen	26,79	17,286	64,52

6	Meningkatkan Produksi Olahan Perikanan	Persentase peningkatan produksi olahan perikanan	Persen	31,51	23,13	73,40
---	--	--	--------	-------	-------	-------

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2024

Dari Tabel 3.2 diatas dapat disimpulkan bahwa dari 6 (enam) Sasaran Strategis yang diampu oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sesuai Perbup IKU Nomor 34 tahun 2024, hanya ada 3 (tiga) sasaran strategis yang sudah memenuhi target dengan capaian kinerja diatas 100%. Diantaranya sasaran strategis Meningkatkan Keterjangkauan Pangan dengan capaian kinerja sebesar 137,32%, sasaran strategis Meningkatkan Pemanfaatan Pangan dengan capaian kinerja sebesar 116,32% dan sasaran strategis Meningkatkan Produksi Perikanan dengan indicator sasaran Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dengan capaian kinerja sebesar 105,04%.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah dalam rangka mendukung untuk mewujudkan Misi Kepala Daerah yang ke-5 (lima) yaitu **“Memperkokoh Landasan Perekonomian Masyarakat”** dan ke-1 (satu) yaitu **“Mewujudkan Pemerintahan yang Handal, Bersih, Terpercaya dan Berwibawa dalam Pelayanan Publik”**, melalui penetapan 3 (tiga) tujuan yaitu:

1. Meningkatnya kedaulatan pangan ;
2. Meningkatnya Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan; dan
3. Meningkatnya Reformasi Birokrasi yang Akuntabel dan Menopang Pelayanan Publik.

Kemudian untuk mencapai tujuan tersebut di atas telah ditetapkan melalui pencapaian 7 (tujuh) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatkan Ketersediaan Pangan;
2. Meningkatkan Keterjangkauan Pangan;
3. Meningkatkan Pemanfaatan Pangan;
4. Meningkatkan Produksi Perikanan;
5. Meningkatkan Pengawasan Perikanan;
6. Meningkatkan Produksi Olahan Perikanan;
7. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Untuk mencapai masing-masing sasaran strategis tersebut di atas, pada tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melaksanakan 8 (delapan) program utama dan 1 (satu) Program Penunjang yaitu:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan;
5. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
6. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
7. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
8. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

3.2.1. Sasaran ke 1 Meningkatnya Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk didalamnya impor dan bantuan pangan) apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, regional, kecamatan dan tingkat masyarakat.

Tabel. 3.3
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Pada Setiap Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Meta Indikator (Rumus)
1	2	3	4
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan	$= \frac{\text{Ketersediaan Pangan Tahun } x}{\text{Kebutuhan Pangan Tahun } x} \times 100\%$

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2024

Tabel. 3.4
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Pangan

No	Indikator Sasaran	Baseline Tahun ke-n (2023)	Tahun n+1 (2024)			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2026 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Ketersediaan Pangan	152,67	153,22	141	92,02	154,17	91,46

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat ditentukan perhitungan realisasi Persentase Ketersediaan Pangan dapat di hitung dengan rumus ketersediaan (ton) dibagi kebutuhan (ton) dikali 100% yaitu 77.722 ton dibagi 55.154 ton dikali 100% sehingga mendapatkan angka 141%.

Grafik 2. Prognosa Neraca Beras Tahun 2024

Bulan	Ketersediaan (Ton)						Kebutuhan (Ton)			Neraca (Ton)
	Stok Awal	Produksi GKG	Produksi Beras	Barang Masuk	Barang Keluar	Total Ketersediaan	Rumah Tangga	NonRumah Tangga	Total Kebutuhan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (2)+(4)+(5)-(6)	(8)	(9)	(10) =(8)+(9)	(11) = (7)-(10)
Jan-24	1.288	3.764	2.227	1.158		4.672	4.130	522	4.652	20
Feb-24	20	20.051	11.862	1.181		13.064	3.864	489	4.352	8.712
Mar-24	8.712	27.508	16.273	919		25.903	4.138	523	4.661	21.242
Apr-24	21.242	5.155	3.050	826		25.118	4.183	529	4.712	20.406
May-24	20.406	6.708	3.968	899		25.272	4.130	522	4.652	20.620
Jun-24	20.620	2.474	1.464	1.486		23.570	4.000	506	4.506	19.064
Jul-24	19.064	9.585	5.670	947		25.681	4.130	522	4.652	21.029
Aug-24	21.029	20.331	12.028	1.551		34.608	4.130	522	4.652	29.956
Sep-24	29.956	8.693	5.143	863		35.961	3.997	505	4.502	31.459
Oct-24	31.459	1.015	600	700		32.760	4.130	522	4.652	28.108
Nov-24	28.108	965	571	1.420		30.099	3.997	505	4.502	25.597
Dec-24	25.597	792	468	1.160		27.225	4.134	523	4.657	22.568
Total 2024	1.288	107,039	63,324	13,110	0	77,722	48,963	6,191	55,154	22,568

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2024

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya ketersediaan pangan dengan indikator persentase ketersediaan pangan berikut program dan kegiatannya.

- Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun sub kegiatan pendukungnya sebagai berikut:
 - Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - a) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan. Adapun sub kegiatan pendukungnya sebagai berikut:
 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya

- Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
 - Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
 - Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota
 - Pemantauan Stok Pangan
 - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota.
- b) Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota. Adapun sub kegiatan pendukungnya sebagai berikut :
- Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- c) Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi. Sub Kegiatan pendukungnya sebagai berikut:
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun

Kegiatan Pendukung Aspek Ketersediaan Pangan
Promosi dan Edukasi Pola Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman
(B2SA) kegiatan penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal.





Penyerahan Bantuan Benih kepada Kelompok Wanita Tani Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal



Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan



Gerakan Pangan Murah
9 Mar 2024 07:46:08
Kecamatan Singkup
Altitude: 55.9m
Speed: 0.0km/h



Pelaksanaan Pelatihan Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal bersama Kelompok Wanita Tani di BPP Muara Pawan





Penyerahan Bantuan Sarana Produksi Pertanian kepada Kelompok Wanita Tani dan Poktan Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga





Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi Pola Konsumsi Pangan B2SA Berbasis Sumber Daya Lokal kepada Kader PKK Desa Kalinilam dan Keluarga Stunting



Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang



Pembangunan Lumbung Pangan dan Lantai Jemur Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota





Tabel. 3.5
 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis Meningkatnya Ketersediaan Pangan tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Meningkatnya ketersediaan pangan	Persentase Ketersediaan Pangan	Persen	153,22	141	92,02

Sumber Data: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2024

Adapun capaian realisasi kinerja untuk persentase ketersediaan pangan yaitu mencapai 92,02%. Pada aspek ketersediaan pangan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat kabupaten ketapang walaupun belum mencapai target capaian kinerja. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan. Mayoritas bahan pangan yang diproduksi maupun didatangkan dari luar wilayah harus masuk terlebih dahulu ke pasar sebelum sampai ke rumah tangga. Oleh karena itu, selain kapasitas produksi pangan, keberadaan sarana dan prasarana penyedia pangan seperti pasar akan terkait erat dengan ketersediaan pangan di suatu wilayah.

Tabel. 3.6
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Baseline 2023	2024			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2024 Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan	152,67	153,22	141	92,02	154,17	91,46

Sumber Data: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2024

Berdasarkan Tabel diatas untuk Indikator Kinerja Utama Meningkatnya Ketersediaan Pangan terhadap target akhir renstra Tahun 2026 menunjukkan bahwa Capaian Persentase Ketersediaan Pangan mencapai 91,46%.

Tabel. 3.7
Indikator Sasaran Strategis Bidang Ketahanan Pangan

No	Rumusan Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Ketersediaan Pangan					
	Target	152,16	152,67	153,22	153,67	154,17
	Realisasi	116	102	141		

Sumber Data: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2024

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa indikator sasaran *meningkatnya ketersediaan pangan* menunjukkan fluktuasi capaian realisasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, realisasi mencapai 116%, kemudian menurun menjadi 102% pada tahun 2023, dan kembali meningkat secara signifikan menjadi 141% pada tahun 2024.

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan Ketersediaan Pangan Kabupaten Ketapang

- Belum terpenuhinya anggaran untuk pengadaan cadangan pangan sesuai ketentuan yang berlaku. Cadangan pangan yang dimaksud disini adalah beras sesuai dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 16 Tahun 2019 dimana cadangan beras pemerintah daerah minimal 100 ton;

- Luas lahan pertanian (sawah) yang mengalami penurunan mempengaruhi kapasitas produksi pertanian dari tahun ke tahun;
- Keterbatasan sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga dimana semakin tinggi rasio sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga desa diasumsikan semakin baik tingkat ketersediaan pangan di desa tersebut;
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pola pangan beragam, bergizi seimbang dan aman dengan memanfaatkan sumber pangan lokal;
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi pengolahan produk pasca panen terutama pangan lokal sebagai upaya ketersediaan cadangan pangan non beras;
- Belum optimalnya produksi hasil pertanian masyarakat khususnya padi akibat adanya gagal panen karena hama dan faktor perubahan cuaca ekstrim sehingga berdampak kepada stok cadangan pangan pada lumbung pangan masyarakat;
- Belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur pendukung ketersediaan dan distribusi pangan.

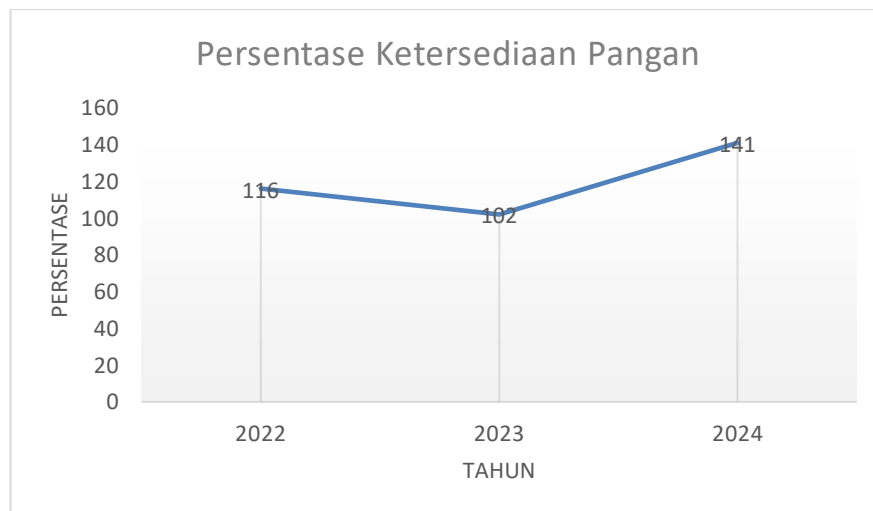
Kedepannya dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan di Kabupaten Ketapang akan dilakukan hal - hal sebagai berikut.

- Mengusulkan anggaran untuk pengadaan cadangan pangan sesuai dengan kebutuhan atau target yang telah ditetapkan melalui APBD Kabupaten Ketapang
- Melakukan koordinasi untuk pengaturan pembatasan alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan atau kegiatan lainnya terutama bagi daerah yang sangat potensial untuk lahan pertanian termasuk untuk pengembangan sentra produksi pangan/food estate yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah
- Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam upaya pengembangan sarana prasarana penyedia pangan di daerah terpencil
- Melakukan sosialisasi, promosi, edukasi Pola Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman dengan memanfaatkan Sumber Daya Lokal di berbagai lapisan masyarakat.
- Melakukan pelatihan dan penyediaan teknologi pengolahan pangan pasca panen dalam rangka pengembangan produk pangan lokal sebagai cadangan pangan non beras

- Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait agar dapat melakukan upaya-upaya peningkatan produksi pertanian baik melalui intensifikasi atau ekstensifikasi khususnya padi dan jagung pada wilayah-wilayah yang sangat potensial
- Melakukan monitoring dan evaluasi terkait pemanfaatan bantuan infrastruktur pendukung cadangan dan distribusi pangan.

Selanjutnya jika dilihat dari capaian kinerja sasaran strategis untuk indikator kinerja yang pertama yaitu “Persentase Ketersediaan Pangan” dimulai dari tahun 2022 hingga tahun 2024 terus mengalami surplus karena mampu menyediakan kebutuhan pangan di atas 100%. Dalam hal ini menunjukkan kondisi perbaikan dalam hal penyediaan kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten Ketapang. Untuk lebih jelasnya pada grafik berikut ini:

Gambar 3.1 Grafik Capaian Indikator Kinerja Utama Meningkatkan Ketersediaan Pangan Tahun 2022 - 2024



Berdasarkan Gambar 3.1 menunjukkan Persentase Ketersediaan Pangan tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 38 persen. Pada tahun 2024 pula, persentase ketersediaan pangan mencapai persentase tertinggi sejak tahun 2022. Sejak tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan ketersediaan pangan terhadap kebutuhan masyarakat kabupaten ketapang telah terpenuhi lebih dari 100%.

Tabel. 3.8
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Ketersediaan Pangan dengan Kabupaten tetangga
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Ketapang	Kayong Utara	Provinsi	Nasional
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan	141	118,7	-	-

Sumber Data: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan perbandingan sasaran strategis bidang ketahanan pangan dengan kabupaten tetangga. Persentase ketersediaan pangan berdasarkan neraca prognosa pangan yang disusun setiap bulannya oleh masing-masing dinas terkait hingga akhir tahun per kabupaten menunjukkan bahwa persentase ketersediaan pangan Kabupaten Ketapang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Kayong Utara. Sementara itu tidak bisa dibandingkan keduanya dengan provinsi dan nasional keduanya memiliki formula perhitungan yang berbeda.

3.2.2. Sasaran ke 2 Meningkatkan Keterjangkauan Pangan

Keterjangkauan pangan atau akses terhadap pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu wilayah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya: (1) Akses ekonomi: kemampuan keuangan untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi; (2) Akses fisik: keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber pangan; dan/atau (3) Akses sosial: modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan informal dalam mengakses pangan, seperti barter, pinjaman atau program jaring pengaman sosial.

Tabel. 3.3
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Pada Setiap Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Meta Indikator (Rumus)
1	2	3	4
2	Meningkatnya Keterjangkauan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	$= \frac{\text{Jumlah Daerah Rentan Rawan Pangan}}{\text{Jumlah Seluruh Daerah}} \times 100\%$

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2024

Tabel. 3.4

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Keterjangkauan Pangan

No	Indikator Sasaran	Baseline Tahun ke-n (2023)	Tahun n+1 (2024)			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2026 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	15	14,5	6,11	137,32	13,5	120,95

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat ditentukan perhitungan Realisasi Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan dapat dihitung dengan rumus Desa rentan Prioritas I dibagi total desa dikali 100% yaitu 16 Desa dibagi 262 Desa dikali 100% sehingga mendapatkan angka 6,11%. Dari rumus tersebut dapat dijelaskan bahwa semakin kecil persentase Daerah Rentan Rawan Pangan maka semakin baik capaian kinerjanya.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya keterjangkauan pangan dengan indikator persentase daerah rentan rawan pangan berikut program dan kegiatannya.

1. Program Penanganan Kerawanan Pangan

a. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan.

Adapun Sub Kegiatan pendukungnya sebagai berikut:

- Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

b. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota.

Adapun Sub Kegiatan pendukungnya sebagai berikut:

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota

Kegiatan Pendukung Aspek Keterjangkauan Pangan

Rapat Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Ketapang Tahun 2024 sebagai instrumen kebijakan penanganan kerawanan pangan



Penyerahan Bantuan Pangan untuk Daerah Rawan Pangan Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan



Tabel. 3.5

Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis Meningkatnya Keterjangkauan Pangan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
2	Meningkatnya Keterjangkauan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen	14,5	6,11	137,32

Sumber Data: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian realisasi kinerja untuk sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya keterjangkauan pangan dengan indikator persentase daerah rentan rawan pangan sebesar 137,32. Pada aspek keterjangkauan pangan yaitu angka penurunan jumlah daerah rentan rawan pangan Kabupaten Ketapang berdasarkan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 890/DKPP.B/2024 tentang Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Ketapang Tahun 2024 menunjukkan penurunan yang signifikan yaitu hanya ada 16 Desa yang termasuk prioritas 2 dari 262 Desa secara keseluruhan atau 6.11%. Sementara target tahun 2024 yaitu sekitar 38 Desa yang termasuk prioritas 1 dan 2 dari 262 Desa secara keseluruhan, selain itu pada tahun 2024 tidak ada desa yang masuk prioritas 1 (sangat rentan pangan).

Tabel 5.1 Sebaran Jumlah Desa berdasarkan Prioritas Komposit

Prioritas	Range	Jumlah Desa/Kelurahan	Persentase
1	Sangat Rentan	0	0,00%
2	Rentan	16	6,11%
3	Agak Rentan	30	11,45%
4	Agak Tahan	81	30,92%
5	Tahan	80	30,53%
6	Sangat Tahan	55	20,99%

Sumber Data : Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Ketapang

Tabel. 3.6
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Baseline 2023	2024			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2024 Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	% Capaian		
2	Meningkatnya Keterjangkauan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	15	14,5	6,11	137,32	13,5	120,95

Sumber Data : Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Ketapang

Berdasarkan Tabel diatas untuk Indikator Kinerja Utama Meningkatnya Keterjangkauan Pangan terhadap target akhir renstra Tahun 2026 menunjukkan bahwa Capaian Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan 120,95%.

Tabel. 3.7
Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Keterjangkauan Pangan

No	Rumusan Sasaran	Indikator Sasaran Strategis				
		2022	2023	2024	2025	2026

	Strategis					
2	Meningkatkan Keterjangkauan Pangan					
	Target	15,5	15	14,5	14	13,5
	Realisasi	27,48	8,39	6,11		

Sumber Data : Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Ketapang

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa indikator sasaran meningkatkan Keterjangkauan Pangan menunjukkan trend positif capaian realisasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, realisasi mencapai 27,48%, kemudian menjadi 8,39% pada tahun 2023, dan kembali mengalami perubahan secara signifikan menjadi 6,11% pada tahun 2024.

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan Keterjangkauan Pangan Kabupaten Ketapang

- Masih tingginya persentase penduduk miskin di Kabupaten Ketapang. Hingga akhir tahun 2024 data dari BPS Kabupaten Ketapang menunjukkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Ketapang masih sebesar 8,5% menurun 0,75% poin pada Maret 2023. Tetapi posisi kemiskinan Kabupaten Ketapang masih masuk dalam kelompok 3 tertinggi di Provinsi Kalimantan Barat disusul Kabupaten Landak dan Sintang.
- Masih rendahnya tingkat pendapatan per kapita rata-rata keluarga karena keterbatasan lapangan pekerjaan dan banyaknya proporsi penduduk dalam usia angkatan kerja yang belum memiliki pekerjaan sehingga berpengaruh kepada tingkat pengeluaran keluarga untuk konsumsi pangan yang harus dikeluarkan atau dibelanjakan untuk kebutuhan pangan keluarga.
- Terbatasnya ketersediaan jaringan listrik dan tantangan akses jalan di beberapa wilayah di Kabupaten Ketapang mempengaruhi aktivitas pekerjaan yang berdampak kepada kegiatan ekonomi masyarakat termasuk terhadap penyimpanan bahan pangan khususnya bahan pangan yang tidak tahan lama. (harus disimpan di tempat khusus seperti lemari pendingin).

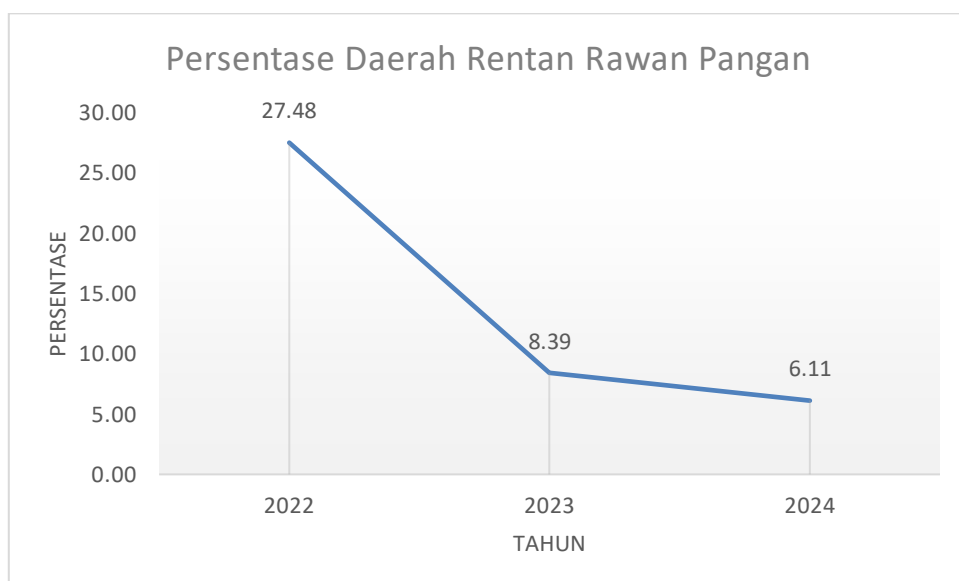
Upaya yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan Keterjangkauan pangan di Kabupaten Ketapang di tahun yang akan datang adalah sebagai berikut.

- Melaksanakan koordinasi kepada stakeholder dalam rangka menyusun program penanggulangan kemiskinan secara berkesinambungan sesuai kewenangan masing-masing pihak.

- Melaksanakan koordinasi dan upaya peningkatan pendapatan keluarga sesuai kewenangan masing-masing pihak.
- Melaksanakan koordinasi kepada pihak terkait untuk mendorong peningkatan kualitas layanan ketersediaan jaringan listrik terutama kepada wilayah-wilayah atau desa yang belum tersedia jaringan listrik selama 24 jam secara terus menerus.
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat agrobisnis dan agroindustri, serta lembaga keuangan mikro dan sarana pendukung perekonomian sampai ke tingkat pedesaan.
- Meningkatkan koordinasi dan sinergitas yang baik antar Perangkat Daerah, terhadap peningkatan dan/atau perbaikan infrastruktur.
- Mendorong pengembangan pelabuhan secara terpadu dengan pengembangan jaringan transportasi lainnya dalam melayani kawasan perkotaan dan pedesaan.

Tingkat capaian kinerja sasaran strategis untuk indikator kinerja yang ke - 2 yaitu “Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan” mulai dari tahun 2022 hingga tahun 2024, menunjukkan adanya penurunan jumlah daerah rentan rawan pangan di Kabupaten ketapang. Semakin kecil angka persentase daerah rentan rawan pangan maka semakin baik pula kondisi ketahanan pangan suatu wilayah. Untuk lebih jelasnya pada grafik berikut ini:

Gambar 3.2 Grafik Capaian Indikator Kinerja Utama Meningkatkan Keterjangkauan Pangan Tahun 2022 - 2024



Berdasarkan Gambar 3.2 menunjukkan penurunan yang signifikan. Sejak tahun 2022 Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan menunjukkan angka 27,48% (72 desa rentan rawan pangan dari 262 desa) hingga tahun 2023 menurun drastis menjadi 8,39% (22 desa rentan rawan pangan dari 262 desa) dan tahun 2024 menjadi 6,11% (16 desa rentan rawan pangan dari 262 desa). Faktor pendukung meningkatkan keterjangkauan pangan yaitu terkendalinya laju inflasi daerah dan keseimbangan harga dan stok pangan serta kesiapan penyaluran bantuan pangan pada musim bencana di Kabupaten Ketapang.

Tabel. 3.8
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Keterjangkauan Pangan dengan Kabupaten tetangga
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Ketapang	Kayong Utara	Provinsi	Nasional
2	Meningkatkan Keterjangkauan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	6,11	6,97	2,3	-

Sumber Data : Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Ketapang 2024

Berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA) yang disusun oleh masing-masing dinas terkait setiap kabupaten menunjukkan persentase daerah rentan rawan pangan di Kabupaten Ketapang lebih kecil jika dibandingkan dengan Kabupaten Kayong Utara. Pada tahun 2024 terdapat 6 desa yang masuk kategori desa rentan rawan pangan dari total 262 desa di Kabupaten Ketapang sementara itu terdapat 3 desa yang masuk kategori desa rentan rawan pangan dari total 43 desa di Kabupaten Kayong Utara. Secara persentase jika dibandingkan dengan total seluruh desa di masing-masing Kabupaten menunjukkan bahwa Kabupaten Ketapang memiliki persentase daerah rentan rawan pangan lebih kecil dibandingkan dengan Kabupaten Kayong Utara. Sementara itu persentase daerah rentan rawan pangan tingkat provinsi jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan Kabupaten Ketapang. Hal ini disebabkan oleh indikator penyusunan peta FSVA provinsi yang menggambarkan ketahanan dan kerentanan pangan pada level kecamatan berbeda dengan penyusunan peta FSVA kabupaten yang menggambarkan ketahanan dan kerentanan pangan pada level desa.

3.2.3. Sasaran ke 3 Meningkatnya Pemanfaatan Pangan

Aspek ketiga dari konsep ketahanan pangan adalah pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan meliputi: (1) Pemanfaatan pangan yang bisa di akses oleh rumah tangga; dan (2) Kemampuan individu untuk menyerap zat gizi secara efisien oleh tubuh. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan termasuk penggunaan air selama proses pengolahannya serta kondisi budaya atau kebiasaan dalam pemberian makanan terutama kepada individu. Pemanfaatan pangan juga erat kaitannya dengan keamanan pangan.

Tabel. 3.3
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Pada Setiap Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Meta Indikator (Rumus)
1	2	3	4
3	Meningkatkan Pemanfaatan Pangan	Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	$= \frac{\text{Jumlah Pangan Segar Aman}}{\text{Total Sampel yang Diambil}} \times 100\%$

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2024

Tabel. 3.4
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)

No	Indikator Sasaran	Baseline Tahun ke-n (2023)	Tahun n+1 (2024)			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2026 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	85	85	99,06	116,54	90	110,07

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat ditentukan perhitungan realisasi Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dapat dihitung dengan rumus jumlah sampel pangan naman dibagi jumlah sampel uji dikali 100% yaitu 316 sampel dibagi 319 sampel dikali 100% sehingga mendapatkan angka 99,06%

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan pangan dengan indikator persentase keamanan pangan segar asal tumbuhan. Berikut program dan kegiatannya.

1. Program Pengawasan Keamanan Pangan

a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota. Adapun sub kegiatan pendukungnya sebagai berikut:

- Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
- Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan

Kegiatan Pengawasan dan Pengujian Mutu Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan





Tabel. 3.5
 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
3	Meningkatnya Pemanfaatan Pangan	Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Persen	85	99,06	116,54

Data: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian realisasi kinerja untuk sasaran strategis ketiga yaitu meningkatnya pemanfaatan pangan dengan indikator persentase keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) sebesar 116,54%. Pada aspek pemanfaatan pangan yaitu pengawasan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan terhadap pestisida, klorin, dan formalin telah terlaksana dengan baik dan mencapai persentase keamanan yang melebihi target. Pengawasan keamanan pangan meliputi pengawasan *pre market* dan *post market*. Total pengambilan sampel sebanyak 319 sampel pada 10 kecamatan dalam 20 pelaksanaan pengambilan sampel dan pengujian sederhana menggunakan rapid test. Kemudian terdapat 3 sampel yang tidak aman yaitu cabai rawit dan seharusnya dapat divalidasi dengan pengujian ulang di laboratorium terakreditasi namun terkendala belum dianggarkannya dana untuk pengujian laboratorium.

Tabel. 3.6

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Baseline 2023	2024			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2024 Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	% Capaian		
3	Meningkatnya pemanfaatan pangan	Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	85	85	99,06	116,54	90	110,07

Sumber Data: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2024

Berdasarkan Tabel diatas untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) terhadap target akhir renstra Tahun 2026 menunjukkan bahwa Capaian Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan 110,07%.

Tabel. 3.7

Indikator Sasaran Strategis Meningkatkan Pemanfaatan Pangan

No	Rumusan Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis				
		2022	2023	2024	2025	2026
3	Meningkatkan Pemanfaatan Pangan					
	Target	80	85	85	90	90
	Realisasi	100	89,61	99,06	-	-

Sumber Data: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2024

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa indikator sasaran Meningkatkan Pemanfaatan Pangan mengalami fluktuasi capaian realisasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, realisasi mencapai 100%, kemudian menurun menjadi 89,61% pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 99,06% pada tahun 2024.

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan Pemanfaatan Pangan Kabupaten Ketapang adalah sebagai berikut :

- Masih belum optimalnya cakupan air bersih yang memenuhi syarat bagi rumah tangga di Kabupaten Ketapang.

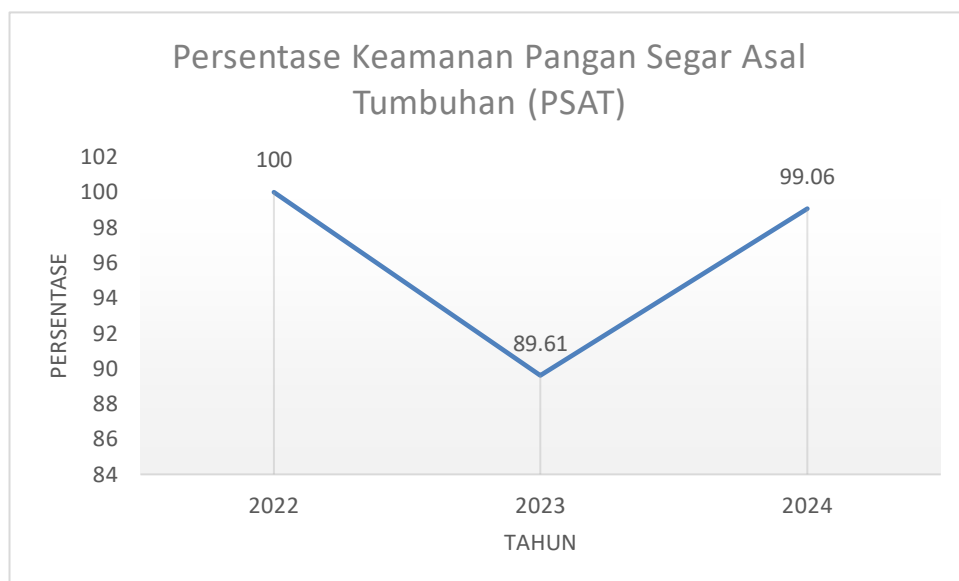
- Belum optimalnya pelaksanaan program promosi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman dan sanitasi.
- Belum meratanya distribusi tenaga Kesehatan di Kabupaten Ketapang terutama di daerah-daerah terpencil yang aksesnya sulit di beberapa kecamatan
- Masih adanya desa-desa stunting yang perlu intervensi program secara terpadu sesuai kewenangan masing-masing pihak.
- Belum tercakupnya pengawasan keamanan pangan di seluruh kecamatan Kabupaten Ketapang

Upaya yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan Pemanfaatan pangan di Kabupaten Ketapang di tahun yang akan datang adalah sebagai berikut

- Melaksanakan koordinasi kepada OPD terkait untuk melakukan upaya peningkatan cakupan akses air bersih termasuk jaringan PDAM kepada masyarakat terutama wilayah-wilayah yang cakupannya rendah.
- Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kesehatan dalam hal promosi sanitasi dan keamanan pangan.
- Melakukan koordinasi kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan pemerataan distribusi dan penambahan tenaga Kesehatan di wilayah yang tenaga kesehatannya sangat terbatas.
- Melakukan koordinasi dengan seluruh OPD terkait serta mengusulkan anggaran untuk kegiatan sesuai kewenangan dalam rangka penanggulangan stunting di Kabupaten Ketapang.
- Mengusulkan penambahan anggaran dalam rangka penyediaan sarana prasarana pengujian keamanan pangan dan peningkatan kapasitas SDM kelembagaan keamanan pangan.

Tingkat capaian kinerja sasaran strategis untuk indikator kinerja yang ke-3 (tiga) yaitu “Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan” dari tahun 2023 ke tahun 2024 meningkat sebesar 9,45%. Untuk lebih jelasnya pada grafik berikut ini ditampilkan capaian kinerja dari sasaran strategis “Meningkatnya Pemanfaatan Pangan” untuk indikator kinerja yang ketiga yaitu “Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan” sebagai berikut:

Gambar 3.3 Grafik Capaian Indikator Kinerja Utama
Meningkatkan Pemanfaatan Pangan Tahun 2022-2024



Berdasarkan Gambar 3.3 menunjukkan peningkatan persentase keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) dari tahun 2023 sebesar 89,61 persen menjadi 99,06 persen pada tahun 2024. Faktor pendukung peningkatan aspek keamanan pangan karena adanya perbaikan kondisi dalam hal pengawasan dan pengujian keamanan pangan segar asal tumbuhan.

Tabel. 3.8
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dengan Kabupaten
tetangga Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Ketapang	Kayong Utara	Provinsi	Nasional
3	Meningkatkan Pemanfaatan Pangan	Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	99,06	50	88.06	-

Sumber Data: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan perbandingan 3 indikator sasaran strategis Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dengan kabupaten tetangga. Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan di Kabupaten Ketapang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Kayong Utara dan Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini disebabkan pengawasan dan pengujian mutu

keamanan PSAT sudah dilakukan secara optimal dan semakin bervariasi mencakup pestisida, formalin dan klorin sehingga produk PSAT yang beredar di pasaran terjamin keamanannya.

3.2.4. Sasaran ke -4: "Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap"

Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap adalah persentase kenaikan hasil tangkapan ikan yang dilakukan di perairan laut dan perairan umum baik yang didaratkan di pelabuhan atau non Pelabuhan.

Tabel. 3.9
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Pada Setiap Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Meta Indikator (Rumus)
1	2	3	4
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	$= \frac{(\text{jumlah produksi perikanan tangkap}(t) \text{ ton} - \text{jumlah produksi perikanan tangkap}(t-1) \text{ ton})}{\text{jumlah produksi perikanan tangkap}(t-1)} \times 100\%$

Sumber data : Perbub Ketapang nomor 35 tahun 2024 tentang IKU Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah

Tabel. 3.10
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1. Meningkatnya Produksi Perikanan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

No	Indikator Sasaran	Baseline Tahun Ke-n	Tahun n + 1			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2026 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
			Target (2024)	Realisasi (2024)	Capaian Kinerja (2024)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	3,57%	3,79%	3,98%	105,04%	7,38%	53,49%

Sumber data : Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan 2024

Berdasarkan table diatas dapat ditentukan perhitungan realisasi Persentase Peningkatan Produksi Perikanan dapat dihitung dengan rumus realisasi (ton) dibagi target (ton) dikali 100% yaitu 30.324 dibagi 7.619,29 dikali 100% sehingga mendapatkan angka sebesar 3,98%.

Berdasarkan hal diatas, diketahui capaian kinerja tahun 2024 untuk Indikator Sasaran 1. Presentase peningkatan produksi perikanan adalah sebesar 105,04%

(realisasi sudah melebihi target). Pencapaian tersebut tidak terlepas dari program dan kegiatan yang pendukung. Program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran 1. yang dilaksanakan Bidang Perikanan Tangkap meliputi:

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan kegiatan yang terdiri atas:

- a) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota, dengan Sub-Kegiatan:

- *Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan*

Pada Sub kegiatan Penyediaan data dan Informasi Sumber Daya Ikan, kegiatan intinya yaitu berupa penyajian data Sumber Daya Ikan dari setiap kecamatan se-kabupaten ketapang. Data dan informasi yang disajikan berupa: Data Produksi Perikanan (hasil tangkapan) yang terdiri dari Perairan Laut dan Perairan Umum (Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya), Data Harga komoditas ikan, Data Pelaku Usaha Perikanan (Nelayan dan Pedagang Ikan), dan Data Ekosistem (Jenis ikan) Perairan Laut dan Umum (Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan genangan air lainnya).

Tabel 3.11 Realisasi Kinerja Capaian Produksi Perikanan Tangkap Per-Kecamatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang

No	KABUPATEN	KECAMATAN	Realisasi 2024 (%)			Target 2024 (%)			Capaian 2024
			Laut	Umum	Jumlah	Laut	Umum	Jumlah	
1	KETAPANG		%	%	% Total	% Total	% Total	% Total	%
		1. Kendawangan	98,64%	1,36%	18,58%	99,73%	0,27%	19,31%	101,10%
		2. Manis Mata	-	100%	0,53%	-	100,00%	1,09%	50,53%
		3. Marau	-	100%	0,18%	-	100,00%	0,01%	3455,35%
		4. Singkup	-	100%	0,20%	-	100,00%	0,01%	1628,53%
		5. Air Upas	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	#DIV/0!
		6. Jelai Hulu	-	100%	0,20%	-	100,00%	0,03%	775,75%
		7. Tumbang Titi	-	100%	0,17%	-	100,00%	0,02%	720,98%
		8. Sungai Melayu Rayak	-	100%	0,12%	-	100,00%	0,02%	727,82%
		9. Pemahan	-	100%	0,07%	-	100,00%	0,01%	1035,35%
		10. Matan Hilir Selatan	97,84%	2,16%	15,34%	94,89%	5,11%	16,52%	97,52%

	11.Benua Kayong	98,05%	1,95%	14,25%	97,66%	2,34%	13,28%	112,66%
	12.Matan Hilir Utara	97,43%	2,57%	16,29%	99,30%	0,70%	13,64%	125,43%
	13.Delta Pawan	97,89%	2,11%	16,94%	97,60%	2,40%	18,98%	93,76%
	14.Muara Pawan	98,33%	1,67%	15,77%	94,94%	5,06%	16,10%	102,85%
	15.Nanga Tayap	-	100%	0,20%	-	100,00 %	0,26%	82,06%
	16.Sandai	-	100%	0,18%	-	100,00 %	0,33%	56,14%
	17.Hulu Sungai	-	100%	0,14%	-	100,00 %	0,13%	111,27%
	18.Sungai Laur	-	100%	0,53%	-	100,00 %	0,14%	413,69%
	19.Simpang Hulu	-	100%	0,17%	-	100,00 %	0,07%	267,28%
	20.Simpang Dua		100%	0,15%	-	100,00 %	0,06%	270,21%
		95,27 %	4,73 %	100%	95,26 %	4,74 %	100 %	105,04%

Kegiatan Pendataan dilaksanakan pada setiap kecamatan se-Kabupaten kota oleh Enumerator Bidang Perikanan Tangkap Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Data hasil survey tersebut disajikan dalam 2 semester per tahun. Dari Data yang disajikan dapat diketahui persentase peningkatan produksi perikanan tangkap.

Dokumentasi Kegiatan:

Pendataan Statistik Perikanan di Kec. Manismata





– **Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap**

Pada Sub-Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap, dilaksanakan beberapa pembangunan prasarana penunjang perikanan berupa: steigher tambatan perahu, gertak, dan jalan rabat beton menuju steigher yang sangat membantu nelayan dalam melaksanakan aktivitas perikanan sehari-hari.

Dokumentasi Kegiatan

1. Kegiatan “PEMBANGUNAN STEIGHER TAMBATAN PERAHU NELAYAN DAN JALAN PRODUKSI KEC.DELTA PAWAN



2. Kegiatan “PEMBANGUNAN STEIGHER TAMBATAN PERAHU NELAYAN DESA KENDAWANGAN KIRI, KEC. KENDAWANGAN



3. Kegiatan “PEMBANGUNAN STEIGHER TAMBATAN PERAHU NELAYAN DESA SUKABANGUN, KEC. DELTA PAWAN



4. Kegiatan “PEMBANGUNAN STEIGHER TAMBATAN PERAHU NELAYAN DESA SUKABANGUN DALAM, DELTA PAWAN



5. Kegiatan “PEMBANGUNAN STEIGHER TAMBATAN PERAHU NELAYAN DESA KUALA SATONG, KEC. MATAN HILIR UTARA



6. Kegiatan “PEMBANGUNAN STEIGHER TAMBATAN PERAHU NELAYAN “GG. DURIAN, DESA TENGAH. KEC. DELTA PAWAN



7. Kegiatan “PEMBANGUNAN STEIGHER TAMBATAN PERAHU NELAYAN DESA SUNGAI TENGAR, KEC. KENDAWANGAN



– *Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap*

Sub-Kegiatan Penyediaan Sarana Usaha perikanan tangkap, dilaksanakan fasilitasi pengadaan alat tangkap bagi nelayan meringankan beban nelayan dan meningkatkan hasil tangkapan.

Dokumentasi Kegiatan:

Bantuan Sarana Prasarana “SUNGAI PAWAN MANDIRI”, DESA TANJUNGPURA, KEC. MUARA PAWAN”



b) Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota

– Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

Pada Sub kegiatan pengembangan kapasitas nelayan kecil dilaksanakan beberapa kegiatan diantaranya melaksanakan pelatihan bagi keluarga nelayan untuk menambah wawasan nelayan.

– Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil.

Pada Sub-kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil dilaksanakan pembentukan kelembagaan berupa organisasi kelompok nelayan, agar para nelayan dapat terorganisir, dan lebih mudah dalam mengembangkan usahanya.

Dokumentasi Sosialisasi Perikanan Laut dan Umum (Air Tawar)



Dokumentasi Sosialisasi Rekomendasi BBM



c) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dengan Sub-Kegiatan:

- Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Pada Sub-Kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dilaksanakan proses penetapan Peraturan Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI yang di sahkan oleh Bupati.

- Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Pada sub-kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), kegiatan yang dilaksanakan yaitu berupa penarikan Retribusi Untuk sewa Kios TPI dan peningkatan pembangunan TPI.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Sampai dengan Bulan Lalu			Bulan Ini			Sampai dengan Bulan Ini			Sisa Anggaran
			Penerimaan	Penyetoran	Sisa	Penerimaan	Penyetoran	Sisa	Penerimaan	Penyetoran	Sisa	
1	2	3	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=4+7	11=5+8	12=10-11	3-12
4	PENDAPATAN DAERAH	136.112.000,00	33.355.000,00	33.355.000,00	0,00	96.058.000,00	96.058.000,00	0,00	129.443.000,00	129.443.000,00	0,00	6.669.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	136.112.000,00	33.355.000,00	33.355.000,00	0,00	96.058.000,00	96.058.000,00	0,00	129.443.000,00	129.443.000,00	0,00	6.669.000,00
4.1.03	Retribusi Daerah	136.112.000,00	33.355.000,00	33.355.000,00	0,00	96.058.000,00	96.058.000,00	0,00	129.443.000,00	129.443.000,00	0,00	6.669.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	136.112.000,00	33.355.000,00	33.355.000,00	0,00	96.058.000,00	96.058.000,00	0,00	129.443.000,00	129.443.000,00	0,00	6.669.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	100.362.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	89.588.000,00	89.588.000,00	0,00	90.088.000,00	90.088.000,00	0,00	10.274.000,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	57.500.000,00	0	0	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	12.500.000,00	0	0	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	30.362.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	17.588.000,00	17.588.000,00	0,00	17.588.000,00	17.588.000,00	0,00	2.774.000,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	10.500.000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	10.500.000,00
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	30.750.000,00	32.855.000,00	32.855.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	34.355.000,00	34.355.000,00	0,00	(3.605.000,00)
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyelenggaraan Tempat Pelelangan	30.750.000,00	32.855.000,00	32.855.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	34.355.000,00	34.355.000,00	0,00	(3.605.000,00)
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produk dari Usaha Daerah	5.000.000,00	0	0	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produk hasil Usaha Daerah berupa Babi atau Berah Ikan	5.000.000,00	0	0	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2024

Berikut adalah dokumentasi kegiatan Pembangunan Peningkatan TPI.

Kegiatan 'PENINGKATAN TEMPAT PENDARATAN IKAN (TPI) PERAIRAN DARAT RANGGA SENTAP'



- d) Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub-Kegiatan:
- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu penyiapan dokumen Penetapan Peraturan Bupati untuk Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT.
 - Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT.
Kegiatan yang dilaksanakan pada sub-kegiatan ini yaitu fasilitasi dokumen Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT.

Dokumentasi Sosialisasi Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan



Untuk Data perhitungan Realisasi Kinerja pada Sasaran 2 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.12 Realisasi Kinerja Capaian Produksi Perikanan Tangkap Per-Kecamatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang

No	KABUPATEN	KECAMATAN	Realisasi 2024 (%)			Target 2024 (%)			Capaian 2024
			Laut	Umum	Jumlah	Laut	Umum	Jumlah	
1	KETAPANG		%	%	% Total	% Total	% Total	% Total	%
		1. Kendawangan	98,64%	1,36%	18,58%	99,73%	0,27%	19,31%	101,10%
		2. Manis Mata	-	100%	0,53%	-	100,00 %	1,09%	50,53%
		3. Marau	-	100%	0,18%	-	100,00 %	0,01%	3455,35 %
		4. Singkup	-	100%	0,20%	-	100,00 %	0,01%	1628,53 %
		5. Air Upas	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	#DIV/0!
		6. Jelai Hulu	-	100%	0,20%	-	100,00 %	0,03%	775,75%
		7. Tumbang Titi	-	100%	0,17%	-	100,00 %	0,02%	720,98%
		8. Sungai Melayu Rayak	-	100%	0,12%	-	100,00 %	0,02%	727,82%
		9. Pemahan	-	100%	0,07%	-	100,00 %	0,01%	1035,35 %
		10.Matan Hilir Selatan	97,84%	2,16%	15,34%	94,89%	5,11%	16,52%	97,52%
		11.Benua Kayong	98,05%	1,95%	14,25%	97,66%	2,34%	13,28%	112,66%
		12.Matan Hilir Utara	97,43%	2,57%	16,29%	99,30%	0,70%	13,64%	125,43%
		13.Delta Pawan	97,89%	2,11%	16,94%	97,60%	2,40%	18,98%	93,76%
		14.Muara Pawan	98,33%	1,67%	15,77%	94,94%	5,06%	16,10%	102,85%
		15.Nanga Tayap	-	100%	0,20%	-	100,00 %	0,26%	82,06%
		16.Sandai	-	100%	0,18%	-	100,00 %	0,33%	56,14%
		17.Hulu Sungai	-	100%	0,14%	-	100,00 %	0,13%	111,27%
		18.Sungai Laur	-	100%	0,53%	-	100,00 %	0,14%	413,69%
		19.Simpang Hulu	-	100%	0,17%	-	100,00 %	0,07%	267,28%
		20.Simpang Dua		100%	0,15%	-	100,00 %	0,06%	270,21%
			95,27 %	4,73 %	100%	95,26 %	4,74 %	100 %	105,04%

Sumber: Bidang Perikanan Tangkap, Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan (2024)

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan bahwa persentase capaian produksi perikanan tangkap tahun 2024 secara keseluruhan sebesar 105,04% dari target (diperoleh dari hasil perhitungan: Perbandingan antara Total Realisasi: Total Target= 30.324,76 ton/28.870,52%). Persentase capaian

terbanyak yaitu dari perairan laut sebesar 105,04%. Sedangkan untuk perairan umum persentase capaiannya sebesar 105,00% dari target. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja 105,04% sudah melebihi target yang ditetapkan.

Tabel. 3.13

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama “Persentase Jumlah Produksi Perikanan Tangkap” Terhadap Target Renstra

No	Indikator	Baseline 2023	2024			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2024 Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisa	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	3,57%	3,79%	3,98%	105,04%	7,38%	53,49%

Sumber Data: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2024

Berdasarkan Tabel diatas diketahui Capaian kinerja untuk Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap tahun 2024 sebesar 105,04 sudah mencapai target. Sedangkan Terhadap target akhir Renstra (2026) tercapai sebesar 53,49%.

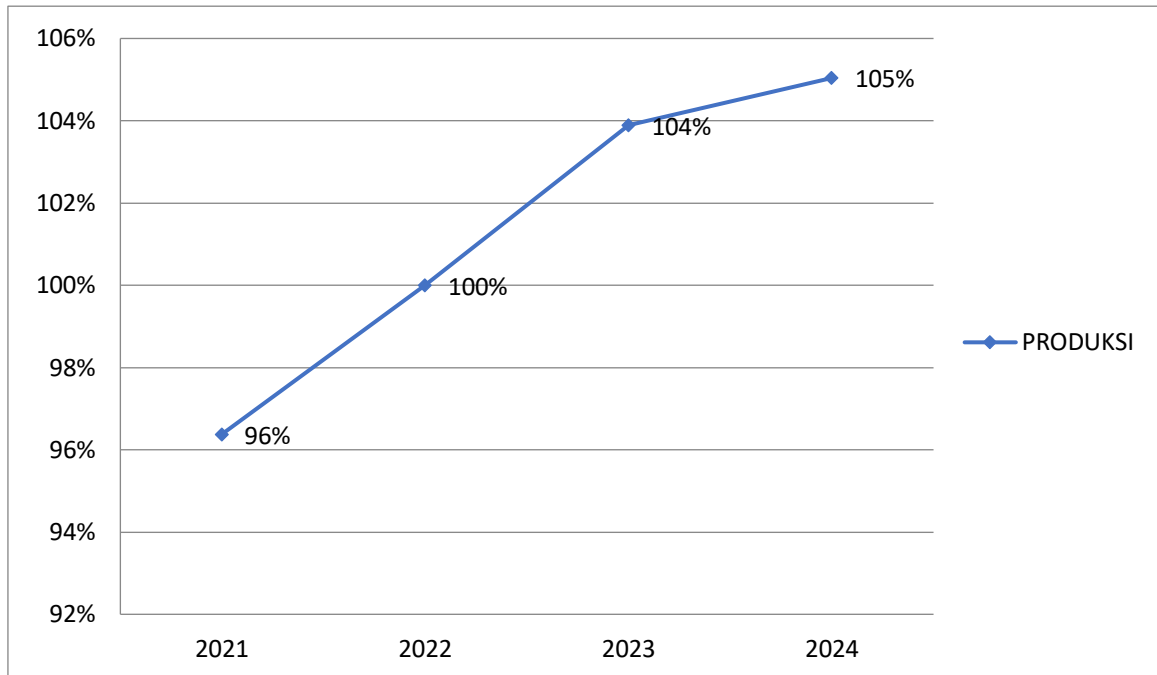
Tabel. 3.14

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama “Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap” Tahun 2021-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja Tahun											
			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatkan Produksi Perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	2%	1,93%	96,38%	6,13%	6,13	100%	3,44%	3,58%	103,89	3,79%	3,98%	105,04%

Sumber Data: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2024

Gambar 3.4
 Grafik “Persentase Peningkatan Produksi
 Perikanan Tangkap”



Sumber: Bidang Perikanan Tangkap, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (2024)

Berdasarkan Gambar Grafik diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan Persentase Produksi Perikanan Tangkap dari tahun 2021 s/d 2024.

Tabel 3.15
 Indikator Sasaran Strategis Bidang Perikanan Tangkap 2022-2026

No	Rumusan Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis				
		2022	2023	2024	2025	2026
	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	100,00	103,89	105,04	-	-
1	Target	6,13%	3,44%	3,79%	4,17%	7,38%
2	Realisasi	6,13%	3,58%	3,98%	-	-

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2024

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan Produksi Perikanan Tangkap terhadap target dari tahun 2022 s/d 2026.

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap adalah:

1. Masih kurangnya anggaran untuk pengadaan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan untuk kelompok-kelompok nelayan di Kabupaten Ketapang termasuk sarana pendukung untuk kegiatan penangkapan ikan seperti kapal motor dan mesin.
2. Terbukanya lapangan pekerjaan di sektor perkebunan dan pertambangan sehingga para nelayan cenderung beralih profesi menjadi pekerja perkebunan karena penerimaan hasil pekerja sektor perkebunan lebih cepat dibandingkan menjadi nelayan.
3. Masih terjadinya kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan seperti penyetruman di wilayah perairan umum (sungai).
4. Masih lemahnya kelengkapan administrasi perizinan kapal nelayan sehingga berpengaruh kepada ketentuan pemberian subsidi seperti BBM Solar dan hal ini berpengaruh pada aktivitas melaut para nelayan.
5. Sulitnya nelayan mendapatkan BBM Solar Bersubsidi pada waktu-waktu tertentu sehingga frekuensi kegiatan melaut untuk menangkap ikan menjadi kurang.

Upaya yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang dalam rangka meningkatkan Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap adalah:

1. Pengadaan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan dan alat bantu penangkapan ikan bagi nelayan melalui DAK dan APBD Kabupaten Ketapang.
2. Memberikan bantuan, pendampingan dan penyuluhan tentang penggunaan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan untuk menjaga sumber daya perikanan agar tetap terjaga.
3. Membangun sarana prasarana penangkapan ikan seperti steigher untuk kapal nelayan, dan perbaikan layanan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
4. Pembinaan administrasi perizinan kapal nelayan agar tidak menimbulkan masalah dalam aktivitas untuk menangkap ikan di laut.

5. Peningkatan mutu pelayanan untuk pemberian Rekomendasi BBM bersubsidi untuk nelayan sehingga aktivitas melaut untuk menangkap ikan berjalan dengan lancar.
6. Melaksanakan koordinasi dengan aparat untuk pengawasan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan seperti menggunakan racun dan penyetruman sesuai kewenangan kabupaten.
7. Memberikan informasi terkait waktu kondisi cuaca ekstrim kepada nelayan agar dapat berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk mendapatkan informasi *real time* tentang prakiraan cuaca sehingga meningkatkan efisiensi dari aktivitas penangkapan ikan di laut.

3.2.5. Sasaran Ke 5 Meningkatkan Pengawasan Perikanan Persentase penurunan hasil tangkapan sampingan (bycatch)

Meningkatkan Pengawasan Perikanan Persentase penurunan hasil tangkapan sampingan (bycatch) adalah Persentase penurunan hasil tangkapan yang tidak diinginkan oleh nelayan, tetapi hasil tangkapan ini kadang kala masih memiliki nilai ekonomis meskipun tidak begitu tinggi ataupun hasil tangkapan tersebut masih dapat dikonsumsi oleh nelayan. memberikan gambaran tentang tekanan terhadap stok dan kelestarian sumberdaya perikanan di perairan.

Tabel. 3.9

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Pada Setiap Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Meta Indikator (Rumus)
1	2	3	4
1	Meningkatkan Pengawasan Perikanan	Persentase penurunan hasil tangkapan sampingan (bycatch)	$\frac{\text{Jumlah hasil tangkapan sampingan (bycatch) tahun } n - \text{Jumlah hasil tangkapan sampingan (bycatch) tahun } n-1}{\text{Jumlah hasil tangkapan sampingan (bycatch) tahun } n-1}$

Sumber Data: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2024

Tabel 3.16.
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2. Pengawasan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

No	Indikator Sasaran	Baseline Tahun Ke-n	Tahun n + 1			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2026 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
			Target (2024)	Realisasi (2024)	Capaian Kinerja (2024)		
1	2	3	4	5	6	7	85%
2	Persentase penurunan hasil tangkapan	43,50%	40,10%	38,50%	96,01%	36,90%	104,34%

Sumber Data: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas, persentase penurunan hasil tangkapan pada tahun 2024 dihitung menggunakan rumus: $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$. Dengan nilai realisasi sebesar 552,47 ton dan target sebesar 1.434,98 ton, maka diperoleh capaian realisasi sebesar 38,50% dari target yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai sasaran 5. Penurunan hasil tangkapan sampingan (bycatch), pada Bidang perikanan tangkap terdapat Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan dengan Kegiatan: Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota dan Sub-Kegiatan: Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu peninjauan langsung ke daerah-daerah rawan proses penangkapan ikan yang berbahaya/tidak ramah lingkungan.

Tabel 3.17
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama “Persentase penurunan hasil tangkapan sampingan (bycatch)” Terhadap Target Renstra

No	Indikator	Baseline 2023	2024			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2024 Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisa	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Persentase penurunan hasil tangkapan sampingan (bycatch)	43,50 %	40,10%	38,50%	96,01%	36.90%	104,34%

Sumber Data: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2024

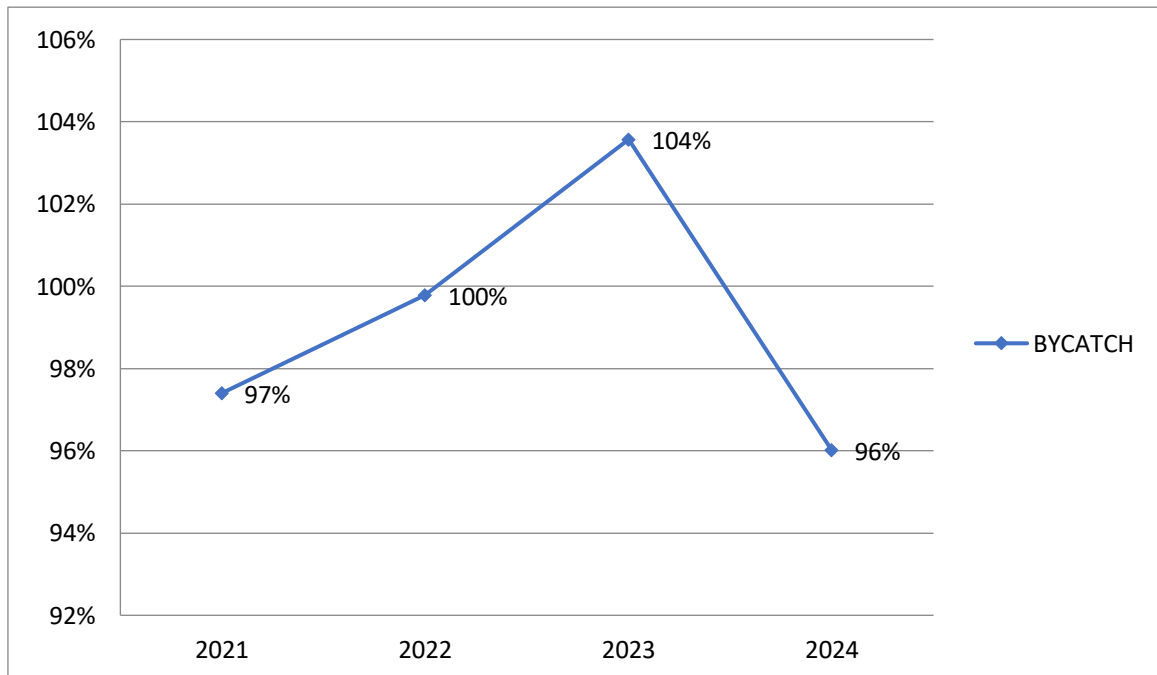
Berdasarkan tabel diatas diketahui Persentase penurunan hasil tangkapan sampingan (bycatch) tahun 2024 sebesar 96,01%, belum mencapai target. Namun Untuk capaian “persentase penurunan hasil tangkapan sampingan (bycatch)” terhadap target akhir Renstra sebesar 104,34%, sudah mencapai target. Hasil ini berbanding lurus dengan potensi perikanan tangkap yang besar di Kabupaten Ketapang termasuk di wilayah perairan umum pada daerah aliran Sungai Pawan dan Sungai Pesaguan.

Tabel. 3.18
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
“Meningkatkan Pengawasan Perikanan” Tahun 2021-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja Tahun											
			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Meningkatkan Pengawasan Perikanan	Persentase penurunan hasil tangkapan sampingan (bycatch) (%)	50%	48,70	97,40	45,50%	45,40 %	99,78 %	42,00%	43,50 %	103,57%	40,10%	38,50%	96,01%

Sumber Data: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2024

Gambar 3.4
Grafik “Persentase Penurunan hasil Sampingan (bycatch)”



Berdasarkan Grafik diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan hasil tangkapan Sampingan (bycatch) yang signifikan dari 97% (2021) menjadi 96% (2024).

Tabel 3.19
Indikator Sasaran Strategis Persentase penurunan hasil tangkapan sampingan (bycatch) Tahun 2022-2026

No	Rumusan Sasaran	Indikator Sasaran Strategis				
		2022	2023	2024	2025	2026
2.	Persentase penurunan hasil tangkapan sampingan (bycatch)	99,78%	103,57%	96,01%	-	-
1	Target	45,50%	42,00%	40,10%	38,68%	36,90%
2	Realisasi	45,40%	43,50%	38,50%	-	-

Sumber Data: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2024

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan bahwa penurunan hasil tangkapan sampingan masih belum mencapai target untuk tahun 2022 dan 2024 namun pada tahun 2023 sudah mencapai target.

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan Persentase penurunan hasil tangkapan sampingan (bycatch) adalah:

1. Kurangnya pengetahuan dan kapasitas SDM Nelayan
2. Kurangnya peralatan tangkap yang memadai
3. Belum optimalnya pengawasan Perikanan Tangkap
4. Belum optimalnya sarana dan Prasarana

Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan Persentase Penurunan hasil tangkapan sampingan (bycatch) di tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pelatihan Nelayan
2. Melakukan koordinasi antara nelayan dan petugas sesuai dengan peralatan yang diinginkan
3. Melakukan koordinasi dan sumber dana yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan
4. Melakukan koordinasi dan survey tempat dalam pengadaan dan pembangunan fisik kegiatan.

Tabel. 3.20

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Produksi Perikanan dan Meningkatkan Pengawasan Perikanan dengan Kabupaten tetangga Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Ketapang	Kayong Utara	Provinsi	Nasional
1	Meningkatkan Produksi Perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	105,04%	-	-	-
2	Meningkatkan Pengawasan Perikanan	Persentase penurunan hasil tangkapan sampingan (bycatch)	96,01%	-	-	-

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2024

Capaian Kinerja Sasaran Indikator Meningkatnya Produksi Perikanan sudah melebihi target namun untuk Persentase Penurunan Hasil Tangkapan Sampingan (bycatch) belum mencapai target. Untuk perbandingan data dari Kab. Kayong Utara, Provinsi, maupun Nasional belum bisa dibandingkan dikarenakan Data yang diperlukan belum tersedia. Sehingga tidak ada data pembandingan.

3.2.6. Sasaran ke -6: "Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya"

Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya dengan Meta Indikator Persentase kenaikan hasil yang diperoleh dari kegiatan budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang dipanen dari tempat pemeliharaan. baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan dalam bentuk basah. termasuk juga pembenihan ikan.

Tabel. 3.17

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Pada Setiap Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Meta Indikator (Rumus)
1	2	3	4
1	Meningkatkan Produksi Perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	$= \frac{(\text{jumlah produksi perikanan budidaya}(t) \text{ ton} - \text{jumlah produksi perikanan budidaya}(t-1) \text{ ton})}{\text{jumlah produksi perikanan budidaya}(t-1)} \times 100\%$

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2024

Tabel. 3.18
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya

No	Indikator Sasaran	Basline Tahun Ke-n 2023	Tahun n + 1			Target Akhir Renstra 2026	Capaian s/d 2026 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
			Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	39,87%	19,82%	15,453%	77,96%	23,98%	64,42%

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat ditentukan perhitungan realisasi Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dapat dihitung dengan rumus Realisasi (ton) dibagi Target (ton) dikali 100% yaitu 25.153 ton dibagi 3887 ton dikali 100% sehingga mendapatkan angka 15,453%.

Berdasarkan hal diatas dapat dijelaskan bahwa program dan kegiatan mendukung pencapaian sasaran Jumlah Presentase Produksi Perikanan Budidaya Bidang Perikanan Budidaya Terdapat 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan yang diantaranya Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, sedangkan kegiatan yang mendukung yaitu Pengelolaan Pembudidayaan Ikan. Dengan sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

A. Rincian dari sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yaitu :

1. Belanja Bibit dan Pakan Ikan
2. Pengadaan Calon Induk Unggul dan Pakan Calon Induk
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar/Komoditas Lokal

B. Rincian Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota diantaranya yaitu

1. Hibah Pemagaran Kolam Ikan Kelompok FPP Organizer
2. Pembangunan Jembatan BBI Manjau Kecamatan Matan Hilir Utara
3. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Bandeng

4. Pembangunan Kolam Ikan Kelompok Mare Tebuar

Dokumentasi

Pengadaan Bibit Ikan bioflok Percontahaan Budidaya Ikan Air Tawar



Pengadaan Pakan Ikan bioflok Percontohaan Budidaya Ikan Air Tawar



Pengadaan Alat Pengolah dan Penepong Ikan di Kabupaten Ketapang



Pembangunan Barau Timbun BBIP Kendawangan



Pemagaran Kolam Ikan Kelompok FPP Organizer





Pembangunan Jembatan BBI Manjau



Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembudidaya Bandeng



Kolam Ikan Kelompok Mare Tebuar



Sedangkan data perhitungan Realisasi Kinerja pada Sasaran 1 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.19
Realisasi Kinerja Capaian Produksi Perikanan Budidaya Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang

Produksi Perikanan Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Ketapang (Ton), 2024
Production of Fish Capture by Subdistrict in Ketapang Regency, 2024

Kecamatan Subdistrict	Budidaya	Tambak	Kolam	Keramba	Jaring	Sawah	Jumlah
	Laut Marine Culture	Brackist Water Pond	Fresh Water Pond		Apung Floating Cage Net		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 Kendawangan	-	4.640,00	1.581,00	-	-	-	6.221,00
2 Manis Mata	-	-	812,00	-	-	-	812,00
3 Marau	-	-	829,00	-	-	-	829,00
4 Singkup	-	-	102,00	-	-	-	102,00
5 Air Upas	-	-	123,00	-	-	-	123,00
6 Jelai Hulu	-	-	246,00	-	-	-	246,00
7 Tumbang Titi	-	-	230,00	-	-	-	230,00
8 Pemahan	-	-	1.067,00	-	-	-	1.067,00
9 Sungai Melayu Rayak	-	-	163,00	-	-	-	163,00
10 Matan Hilir Selatan	-	1.382,00	71,00	-	-	-	1.453,00
11 Benua Kayong	-	-	1.452,00	-	-	-	1.452,00
12 Matan Hilir Utara	-	126,00	78,00	-	-	-	204,00
13 Delta Pawan	-	-	1.233,00	121,00	-	-	1.354,00
14 Muara Pawan	-	-	2.739,00	-	-	-	2.739,00
15 Nanga Tayap	-	-	1.011,00	-	-	-	1.011,00
16 Sandai	-	-	504,00	-	-	-	504,00
17 Hulu Sungai	-	-	495,00	-	-	-	495,00
18 Sungai Laur	-	-	212,00	-	-	-	212,00
19 Simpang Hulu	-	-	163,00	-	-	-	163,00
20 Simpang Dua	-	-	228,00	-	-	-	228,00
Jumlah / Total	2024	-	6.148,00	13.339,00	121,00	-	19.608,00

Sumber / Source : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan bahwa penghasil produksi terbanyak yaitu dari Budidaya Kolam sebesar 13.339,00 Ton/68,03% ton sedangkan untuk Budidaya Tambak jumlah produksinya 6.148,00/31,35% ton dan untuk budidaya Keramba sebesar 121,00 Ton/0,62% setelah dijumlahkan menjadi 19.608,00 Ton/15,453%. Untuk Produksi Perikanan Budidaya dari target yang ditetapkan sebesar 25.153,40 ton/19,82% dengan capaian kinerja 77,95%.

Tabel. 3.20
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis Bidang Perikanan Budidaya Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Meningkatkan Produksi Perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	%	19,82%	15,453%	77,96%

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2024

Sementara capaian kinerja untuk sasaran ke-3 (tiga) “Meningkatkan Produksi Perikanan” dengan indikator “Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya” hanya tercapai sebesar 19.608 ton/15,453% dari target sebesar 25.153,40 ton/19,82%. Dengan demikian tingkat capaian kinerjanya Sebesar 77,95%.

Tabel. 3.21
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama “Jumlah Produksi Perikanan Budidaya”

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Baseline 2023	2024			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2024 Terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	18,02%	19,82%	15,453%	77,96%	23,98%	64,42%

Sumber Data: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2024

Capaian kinerja untuk jumlah Presentase produksi perikanan budidaya tahun 2024 belum mencapai target, dan jika dilihat kecenderungan setiap tahun jumlah produksi perikanan budidaya dari tahun 2021 hingga akhir tahun 2022 menunjukkan peningkatan setiap tahun namun pada tahun 2022 mengalami penurunan karena adanya bencana banjir pada akhir tahun 2022 yang sangat berpengaruh terhadap produksi perikanan budidaya Pada tahun 2023 dan 2024 mengalami peningkatan kembali di banding tahun 2022 seperti ditampilkan pada tabel 3.21

Tabel 3.22
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
"Jumlah Produksi Perikanan Budidaya"
Tahun 2021-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja Tahun											
			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatkan Produksi Perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	16,74 %	28,81 %	30,33 %	16,38 %	22,14 %	23,90 %	18,02 %	22,54 %	22,12 %	19,82 %	15,453 %	23,65%

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2024

Tabel 3.23
Indikator Sasaran Strategis Bidang Perikanan Budidaya

No	Rumusan Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis				
		2022	2023	2024	2025	2026
	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya					
1	Target	16,38%	18,02%	19,82%	21,80%	23,98%
2	Realisasi	30,10%	31,67%	15,453%		

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2024

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam rangka peningkatan produksi perikanan budidaya adalah sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya kapasitas para pelaku pembudidaya ikan karena terbatasnya kegiatan pelatihan perikanan budidaya dan kaji banding ke daerah lain serta kurangnya pelatihan di tempat (*on the job training*) dengan mendatangkan narasumber yang sudah berpengalaman.
2. Belum optimalnya pengelolaan Balai Benih Ikan Budidaya yang ada di Kecamatan Sandai dan Manjau karena keterbatasan SDM yang berkualitas di lapangan serta keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya.

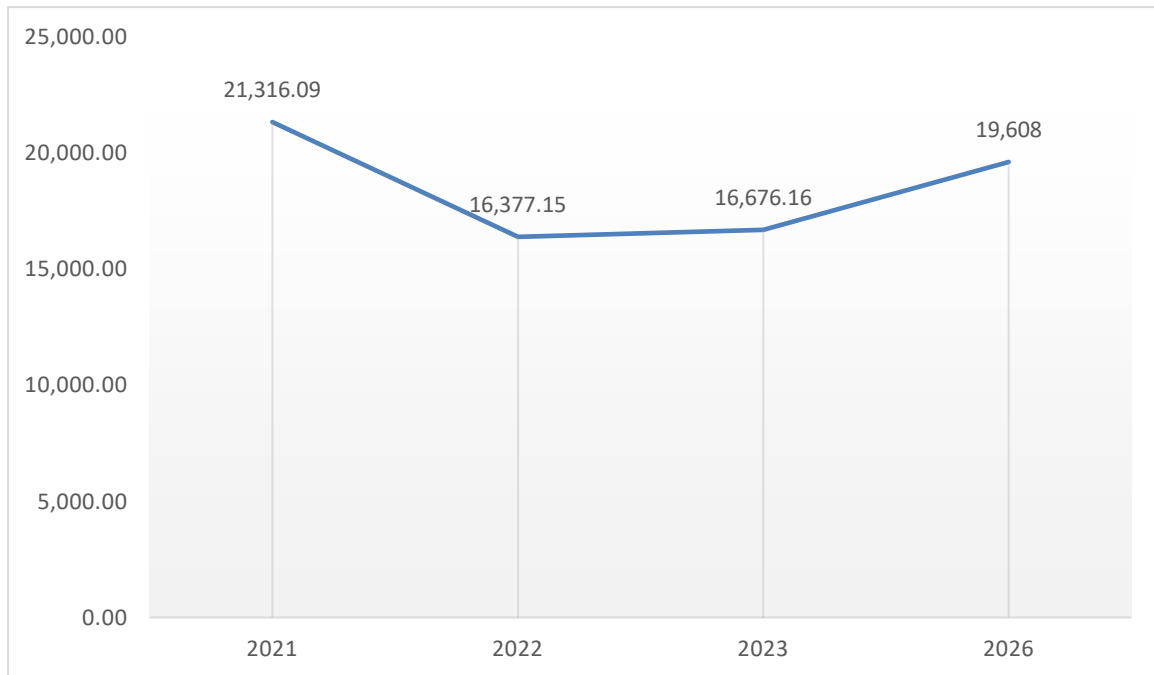
3. Sulitnya kondisi infrastruktur antar wilayah dalam melakukan pembinaan perizinan dan monitoring secara berkala kepada kelompok-kelompok usaha pembudidaya ikan.
4. Terjadinya kenaikan BBM yang berdampak kepada tingginya harga
5. Pakan ikan pabrikan di pasaran mengakibatkan biaya produksi yang semakin besar sehingga berdampak pada produksi perikanan budidaya.
6. Belum terbangunnya komunitas kelompok pembudidaya ikan dan jaringan pemasaran hasil perikanan budidaya dengan baik.
7. Terjadinya bencana banjir akhir Tahun 2022 yang berdampak terhadap jumlah produksi perikanan budidaya.
8. Pada tahun 2023 dan 2024 terdapat kenaikan jumlah produksi perikanan di banding tahun 2022.

Kedepannya dalam rangka meningkatkan Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya di Kabupaten Ketapang akan dilakukan hal - hal sebagai berikut.

1. Memberikan bantuan pakan ikan kepada kelompok serta upaya peningkatan kapasitas kelompok pembudidaya ikan melalui kaji banding sehingga pengetahuan dan minat kelompok untuk usaha membudidayakan ikan semakin meningkat terutama di daerah yang potensial untuk pengembangan perikanan budidaya.
2. Melaksanakan pendampingan dan pembinaan kepada pelaku pembudidaya ikan berupa penyuluhan dan pembinaan usaha perikanan budidaya.
3. Perbaiki sarana dan prasarana Balai Benih Ikan dan pengembangan kapasitas petugas balai benih ikan sehingga dapat menghasilkan bibit/benih ikan unggul yang sangat efektif mendongkrak jumlah produksi perikanan budidaya.
4. Mendorong para pelaku perikanan budidaya untuk membangun jejaring hasil perikanan termasuk fasilitasi pemasaran kepada pihak perusahaan perkebunan.
5. Melaksanakan pelatihan bagi kelompok pembudidaya ikan melalui kerja sama dengan pihak ketiga termasuk kelompok binaan perusahaan yang berminat pada usaha perikanan budidaya.

Melaksanakan kegiatan pembelajaran ke kabupaten lain dan kerja sama pengelolaan BBI dengan UPT Kementerian KKP

Grafik Capaian Indikator Kinerja Utama
“Jumlah Produksi Perikanan Budidaya” Kabupaten Ketapang
 Tahun 2021-2026



Tabel. 3.25
 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Bidang Perikanan Budidaya
 dengan Kabupaten tetangga Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Ketapang	Kayong Utara	Provinsi	Nasional
1	Meningkatkan Produksi Perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	77,96%	NA	NA	NA

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2024

Berdasarkan table 3.25 maka dapat dilihat bahwa capaian Kabupaten Ketapang mengenai peningkatan produksi perikanan adalah 75,96%, sedangkan Kabupaten Kayong Utara belum bisa dijadikan acuan untuk perbandingan karena memiliki IKU yang berbeda dari Kabupaten Ketapang sehingga tidak dapat di masukkn data Presentasinya, sedangkan Untuk Provinsi dan Nasional Belum Bisa Mendapatkan Data dan Informasi Presentase perbandingan jumlah produksinya.

3.2.7. Sasaran ke -7: “Meningkatkan Pengawasan Perikanan”.

Persentase peningkatan kepatuhan administrasi bagi pelaku usaha perikanan dengan Meta Indikator Persentase kenaikan kepatuhan pelaku usaha perikanan yang harus memenuhi kepatuhan teknis pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha sesuai kewenangan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria kementerian/lembaga.

Tabel. 3.26
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Pada Setiap Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Meta Indikator (Rumus)
1	2	3	4
1	Meningkatkan Pengawasan Perikanan	Persentase peningkatan kepatuhan administrasi bagi pelaku usaha perikanan	$= \frac{\text{Jumlah persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan (n)} - \text{Jumlah persentase kepatuhan pelaku usaha Perikanan}}{\text{Jumlah persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan (n - 1)}} \times 100\%$

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2024

Tabel. 3.27
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Persentase peningkatan kepatuhan administrasi bagi pelaku usaha perikanan

No	Indikator Sasaran	Basline Tahun Ke-n 2023	Tahun n + 1			Target Akhir Renstra 2026	Capaian s/d 2026 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
			Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Persentase peningkatan kepatuhan administrasi bagi pelaku usaha perikanan	NA	26,79%	17,286%	64,52%	37,50%	70,42%

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat ditentukan perhitungan realisasi Persentase Peningkatan Kepatuhan Administrasi Bagi Pelaku Usaha Perikanan dapat dihitung dengan rumus Realisasi (ton) dibagi Target (ton) dikali 100% yaitu 70 ton dibagi 12,100 ton dikali 100% sehingga mendapatkan angka 17,286%.

Berdasarkan hal diatas dapat dijelaskan bahwa program dan kegiatan mendukung pencapaian sasaran Jumlah Presentase Produksi Perikanan Budidaya Bidang Perikanan Budidaya Terdapat 2 (satu) Program dan 2 (dua) Kegiatan yang diantaranya Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Dan Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, sedangkan kegiatan yang mendukung diantaranya yaitu kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil dan kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota. Dengan Sub kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dan Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota, dengan Rincian Sub kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan yaitu Pendampingan Pelaku Usaha Perikanan Budidaya tentang Penerapan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Pembuatan Kartu Kusuka dan Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota yaitu Sosialisasi Peraturan Bupati Ketapang Nomor 82 Tahun 2021 tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan di Perairan Umum Kabupaten Ketapang.

DOKUMENTASI

Dokumentasi Penyerahan Sertifikat Usaha Pengolahan Hasil Perikanan



Dokumentasi Sosialisasi Peraturan Bupati Ketapang Nomor 82 Tahun 2021 tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan di Perairan Umum Kabupaten Ketapang





Tabel. 3.28
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis peningkatan kepatuhan administrasi bagi pelaku usaha perikanan tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Meningkatkan Pengawasan Perikanan	Persentase peningkatan kepatuhan administrasi bagi pelaku usaha perikanan	%	26,79%	17,286%	64,52%

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2024

Sementara capaian kinerja Untuk **“Meningkatkan Pengawasan Perikanan”** dengan Indikator Persentase peningkatan kepatuhan administrasi bagi pelaku usaha perikanan tercapai 36 Pirt /17,286% dari Target sebesar 30 Pirt / 26,79% Dengan Demikian Tingkat Capaian Kinerjanya Sebesar 64,52%

Tabel. 3.29
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
“Pengawasan Perikanan Budidaya”

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Baseline 2023	2024			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2024 Terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase peningkatan kepatuhan administrasi bagi pelaku usaha perikanan	NA	26,79%	17,286%	64,52%	37,50%	70,42%

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2024

Capaian Kinerja *Untuk Jumlah Persentase peningkatan kepatuhan administrasi bagi pelaku usaha perikanan* di tahun 2023 belum memiliki data dikarenakan kegiatannya belum adad dan capaian kinerja di tahun 2024 sudah melebihi target yang di tentukan seperti ditampilkan pada tabel 3.27.

Tabel. 3.30
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
“Pengawasan Perikanan Budidaya”
Tahun 2021-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja Tahun											
			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatkan Pengawasan Perikanan	Persentase peningkatan kepatuhan administrasi bagi pelaku usaha perikanan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	26,79%	17,286%	37,50%

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2024

Tabel. 3.31
Indikator Sasaran Strategis Bidang Perikanan Budidaya

No	Rumusan Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis				
		2022	2023	2024	2025	2026
	Persentase peningkatan kepatuhan administrasi bagi pelaku usaha perikanan					
1	Target	NA	NA	26,79%	35,71%	37,50%
2	Realisasi	NA	NA	17,286%		

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2024

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa indikator Persentase peningkatan kepatuhan administrasi bagi pelaku usaha perikanan pada tahun 2022 dan 2023 tidak terdapat nilai besaran realisasi dikarenakan terjadi perubahan IKU sehingga baru biasa dihitung pada tahun 2024 sebesar 17,286 %..

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam rangka peningkatan kepatuhan administrasi bagi pelaku usaha perikanan adalah:

1. Motifasi Pelaku Masih Rendah Terhadap Pembuatan Sertifikat Usaha Pengolahan Hasil Perikanan.
2. Kurang Transfaransinya Pelaku Usaha dalam Memberikan Informasi Terkait Usaha Pengolahan Hasil Perikanan.

Upaya yang dilakukan dan rangka meningkatkan kepatuhan administrasi bagi pelaku usaha perikanan di Kabupaten Ketapang pada tahun yang akan datang adalah sebagai berikut.

1. Melaksanakan pendampingan dan pembinaan kepada pelaku pembudidaya ikan berupa penyuluhan dan pembinaan usaha perikanan budidaya.
2. Melakukan Sosialisasi tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan.
3. Mendorong para pelaku perikanan budidaya untuk membangun jejaring hasil perikanan termasuk fasilitasi pemasaran kepada pihak perusahaan perkebunan.

Tabel. 3.32
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Bidang Perikanan Budidaya dengan Kabupaten tetangga Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Ketapang	Kayong Utara	Provinsi	Nasional
1	Meningkatkan Pengawasan Perikanan	Persentase peningkatan kepatuhan administrasi bagi pelaku usaha perikanan	64,52%	NA	NA	NA

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2024

Untuk Kabupaten Kayong Utara memiliki IKU yang berbeda dari Kabupaten Ketapang Sehingga tidak dapat di masukkan data Presentasinya, sedangkan Untuk Provinsi dan Nasional Belum Bisa Mendapatkan Data dan Informasi Presentase perbandingannya.

3.2.8.Sasaran ke -8: “Meningkatkan Produksi Olahan Perikanan”

Persentase peningkatan produksi olahan perikanan dengan Meta Indikator Produksi hasil perikanan yang telah melalui proses pengolahan dari bahan baku menjadi bahan jadi.

Tabel. 3.33
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Pada Setiap Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Meta Indikator (Rumus)
1	2	3	4
1	Meningkatkan Produksi Olahan Perikanan	Persentase peningkatan produksi olahan perikanan	$= \frac{(\text{jumlah produksi olahan perikanan } (t) - \text{jumlah produksi olahan perikanan } (t-1) \text{ ton})}{\text{jumlah produksi olahan perikanan } (t-1)} \times 100\%$

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2024

Tabel. 3.34

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Persentase peningkatan produksi olahan perikanan

No	Indikator Sasaran	Baseline Tahun Ke-n	Tahun n + 1			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2026 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase peningkatan produksi olahan perikanan	NA	31,51%	23,13%	73,40%	35,40%	26,60%

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2024

Berdasarkan table diatas dapat ditentukan perhitungan realisasi Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan dapat dihitung dengan rumus Realisasi (ton) dibagi Target (ton) dikali 100% yaitu 807 ton dibagi 168,61 ton dikali 100% sehingga mendapatkan angka 23,13%.

Berdasarkan hal diatas dapat dijelaskan bahwa program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Persentase peningkatan produksi olahan perikanan Bidang Perikanan Budidaya Terdapat 1 (satu) Program dan 2 (dua) Kegiatan diantaranya Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, sedangkan kegiatannya meliputi Kegiatan Pembinaan Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, dan Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil dan Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota,

Sedangkan Rincian Kegiatan di dalam sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil yaitu Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan.

Dokumentasi
Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan di Kecamatan Laur Desa Sukaramai





Tabel. 3.35
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis
Meningkatkan Produksi Olahan
Perikanan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Meningkatkan Produksi Olahan Perikanan	Persentase peningkatan produksi olahan perikanan	%	31,51%	23,13%	73,40%

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2024

Capaian kinerja untuk sasaran ke-3 (empat) **“Meningkatkan Produksi Olahan Perikanan”** dengan indikator kinerja utama yaitu **“Persentase peningkatan produksi olahan perikanan”**, pada tahun 2024 usaha olahan perikanan skala mikro dan kecil dan biaya administrasi kegiatan. Dengan demikian maka capaian kinerjanya 328,5691 Ton Pertahun / 23,13 % Pertahun dari target 806,926 Ton/31,51%.

Tabel 3.36
Capaian Kinerja
“Persentase Produk Perikanan yang Bersertifikat”
Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra

No	Indikator Sasaran	2023	2024			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2024 Terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Persentase peningkatan produksi olahan perikanan	NA	31,51%	23,13%	73,40%	35,40%	26,60%

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2024

Dengan capaian kinerja sebesar 328,5691 Ton Pertahun / 23,13% tahun 2024, maka dapat disimpulkan bahwa target Persentase peningkatan produksi olahan perikanan tercapai dan jika dibandingkan dengan target akhir Renstra maka capaiannya baru sebesar 119,0826 Ton/26,60%.

Tabel. 3.37
Indikator Sasaran Strategis Bidang Perikanan Budidaya

No	Rumusan Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis				
		2022	2023	2024	2025	2026
	Persentase peningkatan produksi olahan perikanan					
1	Target	NA	NA	31,51%	33,09%	35,40%
2	Realisasi	NA	NA	23,13%		

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2024

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka peningkatan produksi olahan perikanan adalah :

1. Terbatasnya alokasi anggaran untuk Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sehingga kegiatan dan sub kegiatannya belum dapat dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan yang direncanakan.
2. Belum focusnya rincian belanja kegiatan sesuai tujuannya dalam rangka mencapai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
3. Kurangnya kegiatan pembinaan dan sosialisasi terkait Sertifikat
4. Kelayakan Pengolahan (SKP) sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5
5. Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan.
6. Terbatasnya jumlah peserta untuk mengikuti pelatihan PIRT yang dilaksanakan oleh OPD terkait setiap tahun.
7. Terbatasnya pengetahuan dan wawasan para pelaku usaha pengolahan ikan karena kurangnya kegiatan pembinaan dan pelatihan serta monitoring dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Upaya yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan peningkatan produksi olahan perikanan di Kabupaten Ketapang di tahun yang akan datang adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan dan refocussing anggaran untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi semua pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan Skala Mikro dan Kecil sesuai kewenangan kabupaten.
2. Memberikan bantuan sarana dan prasarana pengolahan ikan kepada Kelompok-Kelompok Usaha Pengolahan Ikan (UPI).
3. Melakukan Pelatihan dan Pembinaan kepada Kelompok Usaha Pengolahan Perikanan skala Mikro dan Kecil agar meningkat pengetahuan dan kesadarannya sehingga kualitas olahan perikanannya memenuhi ketentuan yang berlaku dan pada akhirnya akan mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi karena terjamin kualitasnya.

4. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait, dalam rangka pelatihan PIRT dan penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) sehingga diperoleh data/informasi yang up to date untuk kebutuhan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan.
5. Melaksanakan pembelajaran ke daerah yang telah maju usaha pengolahan ikannya sesuai ketentuan yang berlaku, agar dapat memberikan wawasan dan motivasi yang tinggi bagi pelaku usaha pengolahan perikanan di Kabupaten Ketapang secara bertahap.

Tabel. 3.38
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Produksi Olahan Perikanan dengan Kabupaten tetangga
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Ketapang	Kayong Utara	Provinsi
1	Meningkatkan Produksi Olahan Perikanan	Persentase peningkatan produksi olahan perikanan	73,40%	NA	NA

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2024

Berdasarkan tabel 3.38 maka dapat di simpulkan bahwa Capaian Kinerja Kabupaten Kayong Utara tidak bisa dijadikan perbandingan karena memiliki IKU yang Berbeda dari Kabupaten Ketapang Sehingga tidak dapat di masukkn data Presentasinya, Sedangkan untuk Provinsi Belum Mendapatkan informasi dan Data presentasinya.

3.3. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dari APBD Kabupaten Ketapang dalam rangka mencapai 6 (ENAM) sasaran strategis pada tahun anggaran 2024 adalah **Rp. 19.551.925.428,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 17.423.233.023,-** atau **89,11%**. Adapun rincian realisasi anggaran per sasaran strategis pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.32
Alokasi dan Realisasi Anggaran Menurut Sasaran Strategis
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Ketersediaan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan	153,22	141	92,02	1.595.940.000	1.519.218.206	95,19%
2	Meningkatkan Keterjangkauan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	14,5	6,11	137,32			
3	Meningkatkan Pemanfaatan Pangan	Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	85	99,06	116,54			
4	Meningkatkan Produksi Perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	3,79	3,98	105,04	5.313.336.935	4.049.557.850	76,21%
		Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	19,82	15,453	77,96	4.218.703.030	3.967.440.840	94,04%
5	Meningkatkan Pengawasan Perikanan	Persentase penurunan hasil tangkapan sampingan (bycatch)	40,10	38,50	96,01	90.441.700	76.882.000	85,01%
		Persentase peningkatan kepatuhan administrasi bagi pelaku usaha perikanan	26,79	17,286	64,52	30.000.000	16.937.000	56,46%

6	Meningkatkan Produksi Olahhan Perikanan	Persentase peningkatan produksi olahhan perikanan	31,51	23,13	73,40	1.610.000.000	1.557.115.875	96,72%
7	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada DKPP	Nilai Reformasi Birokrasi DKPP	20 (CC)	***	***	6.723.503.763	6.253.018.252	93%

*** Nilai PMPRB pada tahun 2023 tidak dilakukan penilaian kembali

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2024

Selanjutnya dari realisasi anggaran menurut sasaran strategis tersebut di atas, pada tabel berikut ini ditampilkan analisis efisiensi anggaran dengan cara membandingkan antara capaian kinerja sasaran strategis dengan persentase penyerapan anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.33
Analisis Efisiensi Anggaran Menurut Sasaran Strategis
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang
Tahun Anggaran 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Ketersediaan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan	92,02	95,19	
2	Meningkatkan Keterjangkauan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	137,32		
3	Meningkatkan Pemanfaatan Pangan	Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	116,54		
4	Meningkatkan Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	105,04	76,21	28,83
		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	77,96	94,04	

5	Meningkatkan Pengawasan Perikanan	Persentase penurunan hasil tangkapan sampingan (bycatch)	96,01	85,01	
		Persentase peningkatan kepatuhan administrasi bagi pelaku usaha perikanan	64,52	56,46	
6	Meningkatkan Produksi Olahan Perikanan	Persentase peningkatan produksi olahan perikanan	73,40	96,72	
7	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada DKPP	Nilai Reformasi Birokrasi DKPP	***	***	

*** Nilai PMPRB pada tahun 2023 tidak dilakukan penilaian kembali

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2024

Untuk menentukan *Tingkat Efisiensi* maka digunakan formula yaitu:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \% \text{ capaian kinerja} - \% \text{ penyerapan anggaran}$$

Berdasarkan tabel 3.33 di atas disimpulkan bahwa tingkat efisiensi hanya terdapat pada 1 (satu) sasaran strategis yaitu “**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap**” sebesar 28,83%, sementara untuk 6 (enam) sasaran strategis lainnya tidak dapat ditentukan tingkat efisiensinya karena capaian kerjanya tidak tercapai sebesar 100%, sementara untuk menetapkan adanya efisiensi anggaran adalah apabila kinerja sasaran strategisnya tercapai sesuai yang telah ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja dan terdapat sisa anggarannya.

3.4. Tindak Lanjut Rekomendasi APIP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dilakukan review dan evaluasi atas implementasi SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang termasuk LKjIP oleh Inspektorat Kabupaten Ketapang Tahun 2023 dan diperoleh skor nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah **57,75** atau kategori **CC** dengan interpretasi **CUKUP (Memadai)**.

Adapun hasil tindak lanjut atas rekomendasi APIP (Inspektorat Kabupaten Ketapang) adalah sebagai berikut :

Tabel 3.34

Daftar Rekomendasi APIP atas Evaluasi dan Review LKjIP Tahun sebelumnya serta Tindak Lanjut Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2024

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi
1	Menyampaikan dokumen LKjIP berkala dokumen yang di upload bukan renja melainkan dokumen LKjIP tahun tahun sebelumnya yang dijadikan satu belum menampilkan secara detail atas capaian kinerja yang telah dilakukan.	Memerintahkan Kepada Perencana untuk lebih teliti dalam mengupload dokumen
2	Data capaian dalam setiap indikator tidak dijelaskan secara detail terkait dengan data capaian, tidak hanya menyajikan table	Akan melengkapi data secara detail untuk dokumen selanjutnya
3	Dalam setiap data capaian tidak harap menyertakan metodologi perhitungan	Akan melengkapi data secara detail untuk dokumen selanjutnya dengan mencantumkan metodologi perhitungan
4	Menyampaikan, analisis dan evaluasi secara jelas dan dalam setiap capaian sasaran indikator	Akan disampaikan data analisis dan evaluasi untuk dokumen selanjutnya
5	Belum menampilkan kualitas atas keberhasilan/kegagalan dalam mencapai target kinerja	Akan melengkapi data kualitas secara detail untuk dokumen selanjutnya
6	Agar melakukan publikasi dokumen perencanaan secara tepat waktu setiap bulan setelah dokumen disahkan dengan menggugah pada webseite resmi perangkat daerah	Memerintahkan pengelola website untuk mengupload dokumen perencanaan dimaksud tepat waktu
7	Agar dokumen perencanaan yang dibuat diformulakan secara lengkap dengan membubuhkan tandatangan kepala perangkat daerah dan stempel perangkat daerah	Memerintahkan operator agar terlebih dahulu mengecek dokumen sebelum diupload
8	Melakukan penyesesuaian target kinerja pada dokumen perencanaan sesuai dengan potenssi sumber pendapatan daerah	Melakukan rapat internal membahas prioritas agar selaras dengan kemampuan keuangan daerah

9	Memastikan kualitas dan kecukupan indikator kinerja agar memenuhi kriteria smart (Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-bound) terutama pada kriteria spesifik, relevansi dan terukur	Indikator Kinerja telah ditetapkan setiap tahun dengan keputusan kepala perangkat daerah
10	Melakukan review dan perbaikan untuk memastikan kualitas cascading (perjenjangan) kinerja dari tingkat tertinggi hingga terendah dapat berorientasi outcome (hasil) sesuai dengan tingkatannya dengan memerhatikan logical framework dan csf dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sehingga program dan kegiatan yang disusun dapat efektif dan efisien.	Akan melakukan review dan perbaikan untuk memastikan kualitas cascading
11	Memperkuat target kinerja agar lebih menantang dan dapat dicapai dengan melakukan inovasi	Mengadakan sosialisasi dan pelatihan agar dapat memacu kreativitas dan inovasi
12	Perlu adanya penguatan pemahaman dan kepedulian setiap pegawai terhadap kinerja yang ingin dicapai dengan melakukan rapat kerja secara rutin serta pemberian reward dan punishment kepada pegawai	Mengadakan pelatihan kantor sendiri (PKS) dan pemilihan pegawai teladan per semester serta pembinaan secara berjenjang dan berkelanjutan
13	Menyusun SOP pengumpulan data kinerja bukan SOP Pelayanan	SOP pengumpulan data kinerja belum ada, namun pengumpulan data kinerja dilakukan secara konvensional/manual dari masing-masing unit kerja (sekretariat dan Bidang-Bidang)
14	Melakukan survei internal terkait pemahaman dan kepedulian pegawai terhadap pencapaian kinerja organisasi	Akan melakukan survey internal terkait pemahaman dan kepedulian pegawai
15	Melakukan penyesuaian anggaran yang lebih efisien untuk mencapai target kinerja perangkat daerah	Sudah dilaksanakan dengan menggeser kegiatan yang tidak bisa terlaksana pada perubahan anggaran
16	Agar melengkapai laporan monitoring dan evaluasi triwulan agar kondisi kinerja organisasi dapat terpantau dengan baik	sudah dilakukan dengan membuat evaluasi Renja Pertriwulan
17	Memfaatkan analisa atas pencapaian target kinerja sebelumnya untuk menentukan target kinerja selanjutnya. Hal ini bertujuan agar target kinerja yang ditetapkan dapat memenuhi kriteria relevant dan achievable serta dapat menjadi saran dan masukan pengambilan kebijakan untuk perbaikan perencanaan kinerja berikutnya	dengan membuat laporan realisasi fisik dan keuangan sehingga dapat melihat pos-pos mana yang dianggap tidak atau sudah mencapai target yang ditentukan sehingga dapat menjadi gambaran dalam perencanaan kinerja berikutnya

18	Mengembangkan sistem informasi pengelolaan manajemen kinerja integritasi antara organisasi dan individu secara berjenjang dari tingkat tertinggi hingga terendah dan memanfaatkannya dalam proses pemantauan dan evaluasi pencapaian kinerja secara berkala	dengan membuat perjanjian kinerja untuk para pejabat eselon dan SKP untuk Staf
19	Perlu adanya penguatan pemahaman dan kepedulian setiap pegawai terhadap kinerja yang ingin dicapai dengan melakukan rapat kerja secara rutin serta pemberian reward dan punishment kepada pegawai	Mengadakan pemilihan pegawai teladan per semester/tahun
20	Membuat matrik tindak lanjut rekomendasi LHE tahun 2023	Sudah membuat LHE tahun 2023
21	Menyampaikan bukti tindak lanjut rekomendasi LHE yang telah dibuat	Sudah menyampaikan bukti eviden tahun 2023
22	Menampilkan peningkatan implementasi SAKIP dan LKJIP tahun berikutnya	Akan melengkapi data secara detail untuk dokumen selanjutnya
23	Membuat lembar kerja evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun 2023 setiap triwulan sesuai dengan peraturan Bupati nomor 96 tahun 2022	Lembar kerja terkait Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2024

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ini merupakan wujud pertanggungjawaban capaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Capaian kinerja dari 6(enam) sasaran strategis, dengan 8 (delapan) indikator kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Persentase Ketersediaan Pangan, terealisasi sebesar 141% dari target sebesar 153,22% dengan capaian kinerja sebesar 92,02%.
2. Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan, terealisasi sebesar 6,11% dari target sebesar 14,5% dengan capaian kinerja sebesar 137,32%.
3. Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan, terealisasi sebesar 99,06% dari target sebesar 85% dengan capaian kinerja sebesar 116,54%
4. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap, terealisasi sebesar 3,98% dari target sebesar 3,79% dengan capaian kinerja sebesar 105,04%.
5. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, terealisasi sebesar 15,453% dari target sebesar 19,82% dengan capaian kinerja sebesar 77,96%.
6. Persentase Penurunan Hasil Tangkapan Sampingan (bycatch), terealisasi sebesar 38,50% dari target sebesar 40,10% dengan capaian kinerja sebesar 96,01%.
7. Persentase Peningkatan Kepatuhan Administrasi Bagi Pelaku Usaha Perikanan, terealisasi sebesar 32,34% dari target sebesar 17,286% dengan capaian kinerja sebesar 64,52%.
8. Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan, terealisasi sebesar 23,13% dari target sebesar 31,51% dengan capaian kinerja sebesar 73,40%.

9. Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang dari tahun 2023 Sudah tidak dilakukan penilaian.

Alokasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024, sebesar **Rp.19.551.925.428,-** (sudah termasuk Gaji dan Tunjangan serta Honorarium Tenaga Non PNS) dengan realisasi sebesar **Rp.17.423.233.023,-** atau **89,11%**.

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian sasaran strategis adalah:

1. Perencanaan yang baik sesuai program dan kegiatan/sub kegiatan prioritas dengan mempertimbangkan dampak dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
2. Tersedianya sarana dan prasarana perikanan walaupun masih belum memadai sesuai dengan perkembangan kebutuhan di lapangan;
3. Adanya pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Bupati.
4. Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan prioritas walaupun masih belum memadai sesuai kebutuhan.

Namun demikian, masih banyak kendala yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di bidang ketahanan pangan dan perikanan dalam rangka mencapai sasaran strategis antara lain:

1. Anggaran dalam rangka mencapai indikator sasaran strategis **"Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan"** Tahun 2024 masih belum memadai melalui Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sehingga capaian kinerja masih rendah dan upaya pembinaan dan monitoring untuk mendorong kelompok usaha pengolahan perikanan melaksanakan sertifikasi produk olahannya belum terlaksana dengan baik.
2. Penyediaan kebutuhan sarana prasarana perikanan tangkap dan perikanan budidaya masih terbatas sementara kebutuhan kelompok kelompok usaha perikanan masih sangat sangat tinggi/banyak.
3. Dikarenakan Kemenpan RB telah mengeluarkan peraturan terbaru terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Tematik maka

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis pada masa mendatang, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan akan menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Meningkatkan Ketersediaan Pangan diantaranya:

- Mengusulkan anggaran untuk pengadaan cadangan pangan sesuai dengan kebutuhan atau target yang telah ditetapkan melalui APBD Kabupaten Ketapang
- Melakukan koordinasi untuk pengaturan pembatasan alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan atau kegiatan lainnya terutama bagi daerah yang sangat potensial untuk lahan pertanian termasuk untuk pengembangan sentra produksi pangan/food estate yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah
- Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam upaya pengembangan sarana prasarana penyedia pangan di daerah terpencil
- Melakukan sosialisasi, promosi, edukasi Pola Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman dengan memanfaatkan Sumber Daya Lokal di berbagai lapisan masyarakat.
- Melakukan pelatihan dan penyediaan teknologi pengolahan pangan pasca panen dalam rangka pengembangan produk pangan lokal sebagai cadangan pangan non beras
- Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait agar dapat melakukan upaya-upaya peningkatan produksi pertanian baik melalui intensifikasi atau ekstensifikasi khususnya padi dan jagung pada wilayah-wilayah yang sangat potensial
- Melakukan monitoring dan evaluasi terkait pemanfaatan bantuan infrastruktur pendukung cadangan dan distribusi pangan.

2. Sasaran Strategis Meningkatkan Keterjangkauan Pangan diantaranya:

- Melaksanakan koordinasi kepada stakeholder dalam rangka menyusun program penanggulangan kemiskinan secara berkesinambungan sesuai kewenangan masing-masing pihak.
- Melaksanakan koordinasi dan upaya peningkatan pendapatan keluarga sesuai kewenangan masing-masing pihak.

- Melaksanakan koordinasi kepada pihak terkait untuk mendorong peningkatan kualitas layanan ketersediaan jaringan listrik terutama kepada wilayah-wilayah atau desa yang belum tersedia jaringan listrik selama 24 jam secara terus menerus.
 - Mendorong tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat agrobisnis dan agroundustri, serta lembaga keuangan mikro dan sarana pendukung perekonomian sampai ke tingkat pedesaan.
 - Meningkatkan koordinasi dan sinergitas yang baik antar Perangkat Daerah, terhadap peningkatan dan/atau perbaikan infrastruktur.
 - Mendorong pengembangan pelabuhan secara terpadu dengan pengembangan jaringan transportasi lainnya dalam melayani kawasan perkotaan dan pedesaan.
3. Sasaran Strategis Meningkatkan Pemanfaatan Pangan diantaranya:
- Melaksanakan koordinasi kepada OPD terkait untuk melakukan upaya peningkatan cakupan akses air bersih termasuk jaringan PDAM kepada masyarakat terutama wilayah-wilayah yang cakupannya rendah.
 - Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kesehatan dalam hal promosi sanitasi dan keamanan pangan.
 - Melakukan koordinasi kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan pemerataan distribusi dan penambahan tenaga Kesehatan di wilayah yang tenaga kesehatannya sangat terbatas.
 - Melakukan koordinasi dengan seluruh OPD terkait serta mengusulkan anggaran untuk kegiatan sesuai kewenangan dalam rangka penanggulangan stunting di Kabupaten Ketapang.
 - Mengusulkan penambahan anggaran dalam rangka penyediaan sarana prasarana pengujian keamanan pangan dan peningkatan kapasitas SDM kelembagaan keamanan pangan.
4. Sasaran Strategis Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap diantaranya:
- Pengadaan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan dan alat bantu penangkapan ikan bagi nelayan melalui DAK dan APBD Kabupaten Ketapang.
 - Memberikan bantuan, pendampingan dan penyuluhan tentang penggunaan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan untuk menjaga sumber daya perikanan agar tetap terjaga.

- Membangun sarana prasarana penangkapan ikan seperti steigher untuk kapal nelayan, dan perbaikan layanan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
 - Pembinaan administrasi perizinan kapal nelayan agar tidak menimbulkan masalah dalam aktivitas untuk menangkap ikan di laut.
 - Peningkatan mutu pelayanan untuk pemberian Rekomendasi BBM bersubsidi untuk nelayan sehingga aktivitas melaut untuk menangkap ikan berjalan dengan lancar.
 - Melaksanakan koordinasi dengan aparat untuk pengawasan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan seperti menggunakan racun dan penyetruman sesuai kewenangan kabupaten.
 - Memberikan informasi terkait waktu kondisi cuaca ekstrim kepada nelayan agar dapat berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk mendapatkan informasi *real time* tentang prakiraan cuaca sehingga meningkatkan efisiensi dari aktivitas penangkapan ikan di laut.
5. Sasaran Strategis Meningkatkan Pengawasan Perikanan (Persentase Penurunan Hasil Tangkapan Sampingan (bycatch))
- Perlunya adanya pelatihan Nelayan
 - Perlu koordinasi antara nelayan dan petugas sesuai dengan peralatan yang diinginkan
 - Perlu koordinasi dan sumber dana yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan
 - Perlu koordinasi dan survey tempat dalam pengadaan dan pembangunan fisik kegiatan.
6. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya diantaranya:
- Memberikan bantuan pakan ikan kepada kelompok serta upaya peningkatan kapasitas kelompok pembudidaya ikan melalui kaji banding sehingga pengetahuan dan minat kelompok untuk usaha membudidayakan ikan semakin meningkat terutama di daerah yang potensial untuk pengembangan perikanan budidaya.
 - Melaksanakan pendampingan dan pembinaan kepada pelaku pembudidaya ikan berupa penyuluhan dan pembinaan usaha perikanan budidaya.

- Perbaiki sarana dan prasarana Balai Benih Ikan dan pengembangan kapasitas petugas balai benih ikan sehingga dapat menghasilkan bibit/benih ikan unggul yang sangat efektif mendongkrak jumlah produksi perikanan budidaya.
 - Mendorong para pelaku perikanan budidaya untuk membangun jejaring hasil perikanan termasuk fasilitasi pemasaran kepada pihak perusahaan perkebunan.
 - Melaksanakan pelatihan bagi kelompok pembudidaya ikan melalui kerja sama dengan pihak ketiga termasuk kelompok binaan perusahaan yang berminat pada usaha perikanan budidaya.
 - Melaksanakan kegiatan pembelajaran ke kabupaten lain dan kerja sama pengelolaan BBI dengan UPT Kementerian KKP.
7. Sasaran Strategis Meningkatkan Pengawasan Perikanan (persentase peningkatan kepatuhan administrasi bagi pelaku usaha perikanan) diantaranya:
- Melaksanakan pendampingan dan pembinaan kepada pelaku pembudidaya ikan berupa penyuluhan dan pembinaan usaha perikanan budidaya.
 - Melakukan Sosialisasi tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan.
 - Mendorong para pelaku perikanan budidaya untuk membangun jejaring hasil perikanan termasuk fasilitasi pemasaran kepada pihak perusahaan perkebunan.
8. Sasaran Strategis Meningkatkan Produksi Olahan Perikanan diantaranya:
- Meningkatkan dan refocussing anggaran untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi semua pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan Skala Mikro dan Kecil sesuai kewenangan kabupaten.
 - Memberikan bantuan sarana dan prasarana pengolahan ikan kepada Kelompok-Kelompok Usaha Pengolahan Ikan (UPI).
 - Melakukan Pelatihan dan Pembinaan kepada Kelompok Usaha Pengolahan Perikanan skala Mikro dan Kecil agar meningkat pengetahuan dan kesadarannya sehingga kualitas olahan perikanannya memenuhi ketentuan yang berlaku dan pada akhirnya akan mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi karena terjamin kualitasnya.

- Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait, dalam rangka pelatihan PIRT dan penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) sehingga diperoleh data/informasi yang up to date untuk kebutuhan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan.
- Melaksanakan pembelajaran ke daerah yang telah maju usaha pengolahan ikannya sesuai ketentuan yang berlaku, agar dapat memberikan wawasan dan motivasi yang tinggi bagi pelaku usaha pengolahan perikanan di Kabupaten Ketapang secara bertahap.

LAMPIRAN I

PERJANJIAN KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KETAPANG SEBELUM APBD PERUBAHAN DAN SETELAH APBD PERUBAHAN TAHUN 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**

Jalan Jend. Sudirman No. 15 Ketapang Kode Pos 78813
Telp : (0534) 32753, Fax (0534) 32753
e-mail : dkpp@ketapangkab.go.id website : www.dkpp.ketapangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. Adi Mulla, M.Hut
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : MARTIN RANTAN, S.H, M.Sos
Jabatan : Bupati Ketapang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Martin Rantan, S.H., M.Sos

Ketapang, 04 Januari 2024
Pihak Pertama,

Ir. Adi Mulla, M.Hut
Pembina Utama Muda
NIP. 19651009 199203 1 012

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KETAPANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	20 Angka
2.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketersediaan Pangan	87,96 Angka
3.	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	28.868,52 Ton
4.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Keterjangkauan	83,85 Angka
5.	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	25.153,40 Ton
6.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Pemanfaatan	62,56 Angka
7.	Meningkatnya Kualitas Produksi Perikanan	Persentase Produk Perikanan Yang Bersertifikat	12 Persen
	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Rp. 6.412.919.167	
2.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Rp. 290.340.000	
3.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp. 510.000.000	
4.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Rp. 175.600.000	
5.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Rp. 90.000.000	
6.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Rp. 4.796.494.000	
7.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp. 3.650.000.000	
8.	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp. 80.000.000	
9.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp. 1.500.000.000	

Pihak Kedua,
Bupati Kabupaten Ketapang

Martin Rantan, S.H., M.Sos

Ketapang, 04 Januari 2024
Pihak Pertama,

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Ketapang

Ir. Adi Muli, M.Hut
Pembina Utama Muda
NIP. 19651009 199203 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Jalan Jend. Sudirman No. 15 Ketapang Kade Pos 78813
Telp: (0534) 32753, Fax (0534) 32753
e-mail : dk.pp@ketapangkab.go.id website : www.dkpp.ketapangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Ir. Adi Mulia, M.Hut
Jabatan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama MARTIN RANTAN, S.H, M.Sos
Jabatan Bupati Ketapang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Bupati Kabupaten Ketapang

Martin Rantan, S.H., M.Sos

Ketapang, 01 Juni 2024
Pihak Pertama

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Ketapang

Ir. Adi Mulia, M.Hut
Pembina Utama Muda
NIP. 19651009 199203 1 012

1

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KETAPANG

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2025
1	Meningkatkan Ketersediaan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan	153,23 Persen
2	Meningkatkan Keterjangkauan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	14,50 Persen
3	Meningkatkan Pemanfaatan Pangan	Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	90 Persen
4	Meningkatkan Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	46,83 Persen
		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1,83 Persen
5	Meningkatkan Pengawasan Perikanan	Persentase Penurunan Hasil Tangkapan Sampingan (bycatch)	45 Persen
		Persentase Peningkatan Kepatuhan administrasi bagi pelaku usaha perikanan	26,33 Persen
6	Meningkatkan Produksi Olahan Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan	30 Persen

No.	Program	Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.723.503.763	APBD
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp. 590.340.000	APBD
3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 670.000.000	APBD
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 175.600.000	
5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 160.000.000	APBD
6	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 5.313.336.935	APBD
7	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 4.218.703.030	APBD
8	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp. 90.441.700	APBD
9	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 1.610.000.000	APBD

Pihak Kedua

Bupati Kabupaten Ketapang



Martin Rantan, S.H., M.Sos

Ketapang, Juni 2024
Pihak Pertama

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Ketapang



Ir. Adi Mudi, M.Hut
Pembina Utama Muda
NIP. 19651009 199203 1 012